

**KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN KELOMPOK
TANI DALAM MENINGKATKAN HASIL PRODUKSI PADI DI
KELURAHAN SANGIASSERI KABUPATEN SINJAI**

Disusun dan Diusulkan Oleh :

MAULANA NUR

Nomor Stambuk : 10564 01893 14



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN KELOMPOK
TANI DALAM MENINGKATKAN HASIL PRODUKSI PADI DI
KELURAHAN SANGIASSERI KABUPATEN SINJAI**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diusulkan Oleh :

MAULANA NUR

Nomor Stambuk : 10564 01893 14

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Kelompok Tani
dalam Meningkatkan Hasil Produksi Padi di Kelurahan
Sangiasseri Kabupaten Sinjai

Nama Mahasiswa : Maulana Nur

Nomor Stambuk : 10564 01893 14

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui,

Pembimbing I

Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

Pembimbing II

Handam, S.IP., M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fisipol Unismuh Makassar

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

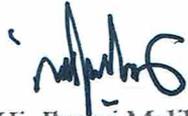
PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0006/FSP/A.3-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Kamis Tanggal 07 Februari Tahun 2019.

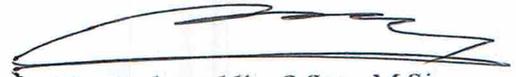
TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si



2. Dr. Amir Muhiddin, M.Si



3. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd



4. Muchlas M. Tahir, S.IP., M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Maulana Nur

Nomor Stambuk : 10564 01893 14

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 29 Januari 2019

Yang Menyatakan,

Maulana Nur

ABSTRAK

Maulana Nur, 2019. Kolaborasi Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Padi di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai (dibimbing oleh Ansayari Mone dan Handam).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi pemerintah daerah dengan kelompok tani di Kelurahan Sangiasseri dan Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan hasil produksi padi di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Permasalahan yang dihadapi petani adalah pembagian pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah cenderung terlambat serta produksi menurun diakibatkan adanya gangguan hama penyakit dan perubahan iklim yang selalu berubah-ubah.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe pendekatan diskriptif dan menggunakan informan sebanyak 9 (sembilan) orang yang dipilih secara sengaja berdasarkan pandangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai yang diteliti yakni, Kepala BPP Sinjai Selatan, pegawai PPL Kelurahan Sangiasseri, ketua Kelompok tani dan anggota kelompok tani. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik Observasi dan studi pustaka serta dikembangkan Wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah daerah dengan kelompok tani dalam meningkatkan hasil produksi padi di kelurahan Sangiasseri belum maksimal tapi ada upaya pemerintah untuk memperbaikinya, baik dari segi penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah, bantuan bibit, pupuk maupun obat-obatan untuk membasmi hama-hama masih kurang dan pangadaan sarana dan prasarana masih terbatas.. Peranan dinas pertanian terhadap penyaluran bantuan bibit dan pupuk sudah terlaksana tetapi belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih kurangnya stok bibit dan pupuk yang didapatkan petani serta adanya keluhan dari petani dikarenakan dalam pemberian bantuan itu digilir setiap tahunnya.

Kata Kunci : Kolaborasi, Pemerintah Daerah, Kelompok Tani.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberi berbagai karunia dan nikmat yang tiada terhitung kepada seluruh makhluknya terutama manusia. Demikian pula salam dan shalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan panutan dan contoh kita di akhir zaman. Dengan keyakinan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kolaborasi Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Padi di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak **Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd** selaku Pembimbing I dan Bapak **Handam, S.IP.,M.Si** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu **Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ibu **Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si** selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Pihak Pemerintah Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai yang telah banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.
6. Saudara(i)ku anak Ilmu Pemerintahan angkatan 2014 yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini..
7. Secara khusus dan istimewa penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya, **Muhammad Nur G** dan **Nurhayati** yang telah mendidik dan membimbing saya dari nkecil hingga dewasa dan selalu memberikan pengajaran yang sangat berharga.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis sangat diharapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 07 Juni 2018

Maulana Nur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kolaborasi	9
1. Pengertian Kolaborasi	9
2. Bentuk-bentuk Kolaborasi	9
3. <i>Collaborative Governance</i>	11
B. Pengertian Pemerintah Daerah	19
C. Pengertian Kelompok Tani	21
D. Kerangka Pikir	26
E. Fokus Penelitian	28
F. Deskripsi Fokus Penelitian	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Informan Penelitian.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Teknik Pengabsahan Data.....	33

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	35
B. Kolaborasi Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Tani dalam Meningkatan Hasil Produksi Padi di Kelurahan Sangiasseri.....	44
C. Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Hasil Produksi Padi di Kelurahan Sangiasseri.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	32
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kelurahan Sangiasseri	36
Tabel 4.2 Jumlah Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kelurahan Sangiasseri	38
Tabel 4.3 Jumlah Saran Pendidikan di Kelurahan Sangiasseri	38
Tabel 4.4 Jumlah Sarana Kesehatan di Kelurahan Sangiasseri	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Sangiasseri.....	42
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian di Indonesia menjadi isu strategis yang penting untuk diselesaikan mengingat sebagian besar mata pencaharian di Indonesia sebagai petani. Berbagai permasalahan yang sering dihadapi oleh petani meliputi gagal panen di berbagai daerah, minimnya infrastruktur pendukung kegiatan pertanian, hingga menyusutnya lahan pertanian akibat dari kegiatan alih fungsi lahan. Masalah tersebut akan berdampak pada fluktuasi produktivitas sektor pertanian yang selanjutnya berpengaruh pada negara dan petani. Bagi negara, produktivitas yang meningkat dapat berdampak pada meningkatnya pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian melalui kegiatan ekspor maupun pengolahan hasil pertanian. Sedangkan bagi petani, peningkatan produktivitas dapat berdampak pula pada kesejahteraan para petani. Semakin tinggi produktivitas pertanian, maka semakin tinggi pula hasil pertanian yang dijual dipasar sehingga pendapatan petani semakin meningkat pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2009), di Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyoli menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi padi secara signifikan adalah luas lahan garapan, tenaga kerja efektif, jumlah pestisida, dan sistem irigasi, sedangkan variabel yang tidak berpengaruh adalah jumlah pupuk dan pengalaman petani. Penelitian Kasturi (2012), menemukan bahwa variabel modal dan luas lahan secara positif dan signifikan terhadap produksi padi di Kabupaten Wajo, namun variabel

tenaga kerja tidak mempunyai pengaruh atau tidak signifikan terhadap produksi padi di Kabupaten Wajo.

Terkait dengan kesejahteraan petani, menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hasil sensus pertanian 2017, rumah tangga pertanian di Indonesia mencapai 39,68 juta dan sebagian dari para pekerjanya hidup di bawah garis kemiskinan.

Kondisi petani yang cenderung berada di bawah garis kemiskinan disebabkan oleh beberapa hal. Seperti tingginya modal yang dibutuhkan dalam proses produksi tidak seimbang dengan penghasilan dari penjualan hasil pertanian. Hal tersebut menyebabkan para petani mengalami kerugian dalam proses produksinya. Harga kebutuhan dalam proses produksi (benih/bibit, pupuk, pestisida, peralatan pertanian, dan sebagainya) yang mahal, perubahan cuaca yang menyebabkan bencana alam, hingga serangan hama yang menjadi faktor rendahnya hasil produksi pertanian merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh petani. Terlebih lagi petani tidak hanya memerlukan modal untuk melakukan proses produksi kembali, namun juga memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang semakin mahal pula. Sedangkan petani berperan penting sebagai pemutar roda perekonomian negara, maka perlu pemberdayaan petani, sehingga petani mampu mandiri menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Salah satu usaha pemerintah bersama petani dalam rangka membangun upaya kemandiriannya adalah dengan membentuk kelompok-kelompok tani di pedesaan. Kondisi perkembangan kelembagaan petani tersebut selama lebih

dari 5 tahun menuntut adanya penyempurnaan terhadap peraturan yang memayunginya, yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani. Dalam rangka mengoperasionalkan pengembangan arah kebijakan tersebut diperlukan review Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai acuan bagi petugas pembina di setiap tingkatan wilayah dan penyuluh pertanian di tingkat lapangan.

Menurut Naiggolan (2014), kelompok tani merupakan kumpulan petani yang terikat secara non formal dan dibentuk atas dasar kesamaan, kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya), keakraban dan keserasian, serta mempunyai pimpinan untuk mencapai tujuan yang sama. Pembentukan kelompok tani bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menghadapi berbagai permasalahan pertanian.

Beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh para petani adalah modal, tenaga kerja serta minimnya pengetahuan petani dalam proses produksi padi. Seperti yang kita ketahui masyarakat Indonesia sejak dahulu sudah terbiasa bekerja berkelompok dengan bentuk yang sesuai dengan budaya dan kondisi lokal yang ada. Dari sisi petani dengan berkelompok akan lebih mudah mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, dibandingkan dengan bekerja sendiri atau perorangan. Hal ini dikarenakan dengan kegiatan berkelompok, petani bisa saling bertukar pikiran, pengalaman serta pengetahuan. Selain itu kelompok akan membangun solidaritas sesama para petani.

Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa perkembangan komoditas unggulan pertanian mampu meningkatkan perekonomian rakyat dalam sektor pertanian, dimana mayoritas penduduknya bermata pencaharian dalam bidang pertanian. Menurut Mubyarto dalam Rahim (2012), sektor pertanian mempunyai kontribusi yang besar dalam pembangunan perekonomian. Secara sektoral, sektor pertanian terdiri dari subsektor pertanian tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor perikanan, dan subsektor kehutanan. Diantara semua subsektor, subsektor pertanian tanaman pangan khususnya padi merupakan penghidupan bagi masyarakat Kabupaten Sinjai.

Salah satu jenis tanaman pangan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat (rumah tangga petani) Kabupaten Sinjai adalah padi sebagai penghasil beras. Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan menyebutkan Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Kenaikan harga beras meskipun relatif sedikit, akan berdampak cukup besar pada naiknya angka inflasi dikarenakan beras dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Padi yang merupakan salah satu komoditas penting dalam sub sektor tanaman bahan makanan di sektor pertanian

mempunyai peranan yang tidak hanya penghasil nilai tambah (*value added*) dan penyediaan lapangan kerja tetapi juga berperan sebagai pengaruh terhadap kestabilan perekonomian nasional. Karena peranannya sangat penting, pemerintah harus memperhatikan dari segi ketersediaan lahan, sumber daya manusianya (petani) serta proses produksi dan distribusi.

Komoditas unggulan di Kabupaten Sinjai khususnya bahan pangan yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah padi karena memiliki produksi tertinggi diantara bahan tanaman pangan lainnya. Perkembangan produksi padi di Kabupaten Sinjai menunjukkan produksi padi mengalami fluktuasi, Produksi padi sawah yang dimaksud di sini adalah produksi gabah kering panen. Produksi padi di Kabupaten Sinjai pada tahun 2016 mencapai 117.079 ton. Bila dibandingkan dengan produksi pada tahun 2015, sebesar 128.777 ton, maka terlihat adanya penurunan sebesar 9,08 persen. Penurunan ini disebabkan karena kemarau di Kabupaten Sinjai sehingga banyak terjadi puso serta menurunnya kualitas produksi padi, (BPS Kabupaten Sinjai dalam angka 2017).

Jika diamati menurut kecamatan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sinjai, besarnya produksi padi yang tertinggi dicapai kecamatan Sinjai Selatan sedangkan yang terendah adalah Sinjai Utara. Pada tahun 2016 sekitar 27.753 ton gabah kering giling atau 23,70 persen dari total produksi padi di kabupaten Sinjai dihasilkan dari kecamatan Sinjai Selatan. Kemudian Tellu Limpoe sebanyak 18.825 ton (16,08 persen). Disusul Bulupoddo sebanyak 16.816 ton (14,36 persen), Sinjai Timur sebanyak 14.140 ton (12,08

persen), Sinjai Tengah sebanyak 12.289 ton (10,50 persen), Sinjai Barat sebanyak 11.034 ton (9,42 persen), Sinjai Borong sebanyak 10.229 ton (8,74 persen), dan Sinjai Utara dengan jumlah produksi 5.993 ton (5,12 persen).

Peran kelompok tani dalam dunia pertanian dilatar belakangi oleh banyak hal diantaranya minat atau keinginan yang sama yang dimiliki oleh para petani, meningkatkan kerjasama para petani, tempat bagi para petani menghadapi masalah pertanian bersama-sama serta mempunyai tujuan yang sama antara para petani. Oleh karena itu, kelompok tani mempunyai peran yang sangat penting dalam dunia pertanian, begitu pula dengan Kelompok Tani yang berada di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai yang berperan penting bagi para anggota kelompok taninya.

Permasalahan yang dihadapi petani di Kecamatan Sinjai Selatan khususnya di Kelurahan Sangiasseri adalah pembagian pupuk bersubsidi yang di berikan pemerintah cenderung terlambat atau pupuk yang di berikan tidak cukup untuk di bagikan ke para petani, permasalahan yang lain bibit/benih yang di berikan pemerintah sering di temukan bibit yang tidak berkualitas, bibit yang tidak berkualitas, Naik turunnya luas tanam, luas panen, dan produksi padi di Kecamatan Sinjai Selatan diakibatkan adanya gangguan hama penyakit dan perubahan iklim yang selalu berubah-ubah. Selain itu, disebabkan pula karena teknik budidaya yang masih dilakukan secara konvensional atau secara tradisional. Dalam proses produksi dilakukan cara yang benar diantara beberapa kemungkinan cara produksi dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan hasil produksi padi.

Pemerintah berupaya untuk lebih memperhatikan pentingnya peningkatan produksi padi di Kabupaten Sinjai dengan segala kendala yang dihadapi. Meski disadari bahwa budaya masyarakat di Kabupaten Sinjai tidak terlepas dari bentuk bercocok tanam sejak nenek moyang terdahulu tetapi tetap mampu meningkatkan hasil produksi padi sebagai salah satu tanaman pangan penghasil beras yang diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi petani padi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kolaborasi Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Padi di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana kolaborasi pemerintah daerah dengan kelompok tani di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kolaborasi pemerintah daerah dengan kelompok tani di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan hasil produksi Padi.
2. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan collaborative pemerintah daerah dengan kelompok tani dalam meningkatkan hasil produksi Padi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kolaborasi

1. Pengertian Kolaborasi

Kolaborasi merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, Kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing, (Kusnandar,2013).

Sebagaimana dikutip oleh Kusnandar (2013), mengatakan bahwa kolaborasi berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah suatu proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kolaborasi melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Sedangkan dalam istilah administrasi, pengertian kolaborasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadari Nawawi adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan, (Nawawi, 2005).

2. Bentuk-bentuk Kolaborasi

Ada tiga jenis kooperasi (kolaborasi) yang didasarkan perbedaan antara organisasi grup atau di dalam sikap grup, yaitu:

1. Kolaborasi Primer

Disini grup dan individu sungguh-sungguh dilebur menjadi satu. Grup berisi seluruh kehidupan daripada individu, dan masing-masing saling mengejar untuk masing-masing pekerjaan, demi kepentingan seluruh anggota dalam grup itu. Contohnya adalah kehidupan rutin sehari-hari dalam bicara, kehidupan keluarga pada masyarakat primitif dan lainlainnya, (Ahmadi, 2004).

Di dalam kelompok-kelompok kecil seperti keluarga dan komunitas komunitas tradisional proses sosial yang namanya kooperasi ini cenderung bersifat spontan. Inilah kooperasi terbentuk secara wajar di dalam kelompok-kelompok yang disebut kelompok primer. Di dalam kelompokkelompok ini individu-individu cenderung membaurkan diri dengan sesamanya di dalam kelompok, dan masing-masing berusaha menjadi bagian dari kelompoknya. Di dalam kelompok-kelompok primer yang kecil dan bersifat tatap muka ini, orang perorangan cenderung lebih senang bekerja dalam tim selaku anggota tim dari pada bekerja sebagai perorangan, (Narwoko, 2004).

2. Kolaborasi Sekunder

Apabila kolaborasi primer karakteristik dan masyarakat primitif, maka kolaborasi sekunder adalah khas pada masyarakat modern. Kolaborasi sekunder ini sangat diformalisir dan spesialisir, dan masing-masing individu hanya membanktikan sebagian dari pada hidupnya kepada grup yang dipersatukan dengan itu. Sikap orang-orang di sisni lebih individualistis dan

mengadakan perhitungan-perhitungan. Contohnya adalah kolaborasi dalam kantor-kantor dagang, pabrik-pabrik, pemerintahan dan sebagainya, (Ahmadi, 2004).

3. Kolaborasi Tertier

Dalam hal ini yang menjadi dasar kolaborasi yaitu konflik yang laten. Sikap-sikap dari pihak –pihak yang kolaborasi adalah murni oportunistis. Organisasi mereka sangat longgar dan gampang pecah. Bila alat bersama itu tidak lagi membantu masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya. Contohnya adalah hubungan buruh dengan pimpinan perusahaan, hubungan dua partai dalam usaha melawan partai ketiga, (Ahmadi, 2004).

3. *Collaborative Governance*

Satu komponen penting dari istilah *collaborative governance* adalah “*governance*” Banyak penelitian yang telah membangun definisi *governance*, akan tetapi definisi tersebut masih sebatas dengan apa yang dapat dikerjakan oleh pemerintah dan difalsifikasi olehnya, namun belum komprehensif. Sebagai contoh, Ansell and Alison (2007), menafsirkan pemerintahan secara luas sebagai rezim hukum, aturan, peradilan, dan praktek-praktek administratif yang didukung untuk membatasi, meresepkan dan mengaktifkan penyediaan barang publik. Definisi ini menyediakan ruang untuk struktur pemerintahan tradisional serta muncul bentuk badan pengambilan keputusan publik atau swasta. Di sisi lain, berpendapat pemerintahan yang merujuk kepada aturan dan membentuk panduan pengambilan keputusan kolektif.

Proses penyelenggaraan negara yang melibatkan banyak aktor dalam menyelesaikan masalah publik merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Mengingat bahwa konsep *governance* itu sendiri meliputi integrasi antara berbagai sektor yang ada dalam suatu negara, yang dalam hal ini negara tidak lagi dominan dan tidak lagi dapat menyelenggarakan suatu negara tanpa adanya keterlibatan dari sektor lain seperti lembaga non pemerintah termasuk masyarakat dalam suatu negara. *Collaborative governance* tidak muncul secara tiba-tiba karena hal tersebut ada disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik. Dalam hal ini masalah pertanian merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan tindakan kolaborasi segera oleh semua pihak yang terkait dengan masalah pertanian.

Adanya kompleksitas masalah yang mengharuskan terjadinya kolaborasi ini dijelaskan dalam teori yang dikemukakan oleh Ansell and Alison dalam Sudarmo (2011), Hal ini sejalan dengan pendapat Hudson dan Hardy dalam Everingham (2012), Hal ini menunjukkan bahwa alasan untuk pemerintahan kolaboratif lebih baik dipahami sebagai potensi laten yang membutuhkan keahlian, konstruksi dan investasi untuk menyadari. Kolaboratif jaringan tidak mungkin untuk tumbuh secara spontan tetapi harus dibudidayakan.

Pentingnya melakukan *collaborative governance* antara lain karena:

1. Kegagalan implementasi kebijakan di tataran lapangan
2. Ketidakmampuan kelompok-kelompok, terutama karena pemisahan rezim-

rezim kekuasaan untuk menggunakan arena-arena institusi lainnya untuk menghambat keputusan

3. Mobilisasi kelompok kepentingan
4. Tingginya biaya dan politisasi regulasi , Ansell and Alison (dalam Sudarmo, 2011).

Pada konteks *good governance* atau tata pemerintahan yang baik, *agent of development* (agen pembangunan) tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat dan sektor swasta yang berperan dalam *governance*. Sehingga, terdapat penyelenggara pemerintah, swasta, juga oleh masyarakat sipil. Pentingnya penerapan *Good Governance* sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *Governance* mencakup tiga domain yaitu *state* (negara), *private sector* (sektor swasta) dan *society* (masyarakat). *Good Governance* diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan *stakeholders* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Lembaga administrasi negara merupakan wujud *Good Governance* sebagai penyelenggara pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesirnegisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara, sektor swasta, dan masyarakat. *Government* sebagai pemerintahan yang bertumpu kepada otoritas telah berubah ke

governance yang bertumpu kepada kompatibilitas, sehingga pemerintah tidak lagi menjadi pemain tunggal. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik) adalah seperangkat proses yang yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta, sipil, maupun negeri untuk menentukan keputusan. *Good governance* juga dapat di artikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan padanilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan dan kehidupan keseharian. *Good governance* menemukan peranannya dalam penanganan konflik dimana *government* yang diwakili oleh pemerintah baik eksekutif dan aparat keamanan berusaha melibatkan peran dan posisi masyarakat terutama masyarakat yang masuk dalam peta konflik. (Dahrendorf, 2013).

Kemunculan dan dikembangkannya *collaborative governance* adalah sebagai sebuah alternatif bagi :

1. Pemikiran-pemikiran yang semakin luas tentang pluralisme kelompok kepentingan.
2. Adanya kegagalan akuntabilitas manajerialisme (terutama manajemen ilmiah yang semakin dipolitisasi) dan kegagalan implementasinya. Ansell and Alison dalam Sudarmo(2011).

Secara umum *collaborative governance* muncul secara adaptif atau dengan sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi
2. Konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam

3. Upaya mencari cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik, Ansell and Alison dalam Sudarmo (2011).

Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independent. Dalam bahasa Indonesia, istilah kerjasama dan kolaborasi masih digunakan secara bergantian dan belum ada upaya untuk menunjukkan perbedaan dan kedalaman makna dari istilah tersebut.

Secara umum lebih dikenal istilah kerjasama dari pada kolaborasi, dan tidak ada pemahaman yang lebih mendalam tentang paradigma apa yang seharusnya dianut. Sudarmo (2011), mendefinisikan kolaborasi pemerintahan adalah kegiatan bersama antara dua atau lebih organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan nilai publik dengan cara bekerja sama daripada secara terpisah. Kolaborasi merupakan proses interaktif dengan melibatkan otonom sekelompok aktor yang memanfaatkan aturan bersama, norma atau struktur organisasi untuk memecahkan masalah, mencapai kesepakatan melakukan tindakan bersama, berbagi sumber daya seperti informasi, dana atau staf.

Sebagai bentuk relasi dan kerjasama antar organisasi, *collaboration* berbeda dengan *coordination* dan *cooperation*. Perbedaannya terletak pada sifat tujuan kerjasama dan bentuk ketergantungannya. *coordination* dan *cooperation* merupakan upaya organisasi dari pihak yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama dengan tujuan yang bersifat statis. Hubungan antarorganisasi dalam koordinasi dan kooperasi bersifat independen. Pada *collaboration*, seluruh pihak bekerjasama dan membangun konsensus untuk

mencapai suatu keputusan yang menghasilkan kemanfaatan bagi seluruh pihak

Ansell dan Alison (2007), kegiatan kolaboratif digambarkan pada pengembangan kebijakan dan implementasi, mengidentifikasi sebuah “*continuum of partnerships*” di mana di salah satunya “networking”. Kemitraan yang terorganisir secara longgar utamanya untuk pertukaran informasi. Berikutnya adalah “*cooperative*”; kemitraan yang melibatkan kesepakatan yang sederhana dan hubungan berkisar dari informal menjadi agak formal. Kemudian “*coordinating*”; kemitraan yang memerlukan lebih banyak komitmen, hubungan ketat dan lebih formalitas. Terakhir, “*collaboration*” adalah kemitraan paling terkuat, hubungan jangka panjang dan formal serta komitmen yang tinggi tentang sumber daya.

Petter dalam Dwiyanto (2010), kerjasama yang bersifat kolaboratif, hubungan principal-agen tidak berlaku karena kerjasama yang terjadi adalah kerjasama antara partisipal dengan partisipal. Dalam kerjasama seperti ini, masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama tetap memiliki otonominya sendiri. Para pihak yang berkolaborasi adalah prinsipal dan sekaligus juga bertindak sebagai agen untuk diri mereka sendiri. Mereka sepakat bekerjasama karena memiliki kesamaan visi dan tujuan untuk diwujudkan secara bersama-sama yang mungkin akan sulit dicapai ketika masing-masing bekerja sendiri.

Kebutuhan untuk berkolaborasi timbul dari interdependensi (hubungan saling ketergantungan) antara aktor, yang disebabkan oleh masing-masing aktor memiliki berbagai jenis dan tingkat teknologi dan sumber daya yang

dibutuhkan untuk memenuhi tugas. Interdependensi menginduksi peningkatan frekuensi dan intensitas komunikasi antar organisasi tersebut, yang pada gilirannya memaksa keputusan yang harus dibuat bersama-sama dan tindakan yang akan dilakukan secara kolektif sampai tingkat tertentu.

Sudarmo (2011), menjelaskan tiga dimensi kolaborasi yang efektif yaitu pencapaian sasaran klien, meningkatkan hubungan-hubungan antar organisasi dan pengembangan organisasi. Tiga dimensi yang berbeda ini merefleksikan jenis-jenis sasaran organisasi yang tidak sama yang dicari dari kolaborasi antar organisasi.

1. Dimensi pertama, pencapaian sasaran klien menunjuk pada tujuan utama dari sebagian usaha sektor publik untuk meningkatkan kolaborasi, yaitu mendapatkan sumber daya yang akan meningkatkan pelayanan.
2. Kedua, hubungan antar organisasi ditingkatkan untuk menangkap kedua hal yakni manfaat kolektif dan potensi kolaborasi organisasi. Jika organisasi dalam kegiatan kolaboratif sama baiknya, hal ini dapat meningkatkan modal sosial pada masyarakat yang dilayani. Hubungan yang lebih baik antara organisasi bekerja untuk meningkatkan kesempatan memecahkan masalah dan membuka jalan bagi hubungan masa depan yang lebih baik.
3. Dimensi ketiga pengembangan organisasi sebagian besar langsung menguntungkan organisasi. Jika kolaborasi meningkatkan pengembangan organisasi, hal ini dapat meningkatkan kapasitasnya untuk bersaing secara efektif atas kontrak masa depan dan dapat meningkatkan kemampuannya untuk mencapai misi dan tujuan.

Kerangka proses kolaborasi menunjukkan bahwa kolaborasi terjadi dari waktu ke waktu sebagai interaksi organisasi baik secara formal dan informal melalui rangkaian yang berulang dari negosiasi, pengembangan komitmen dan pelaksanaan komitmen tersebut. beberapa tahap proses kolaborasi menjelaskan tiga fase kerangka kolaborasi yakni masalah pengaturan, penetapan arah dan pelaksanaan. proses kolaborasi dilihat sebagai sebuah rangkaian strategi yang berkisar untuk mengubah masyarakat melalui “*empowerment collaboration*” atau kolaborasi pemberdayaan.

Thomson dan Perry (2007), mendefinisikan kolaborasi adalah proses di mana para aktor otonom atau semi-otonom berinteraksi melalui negosiasi formal maupun informal, secara bersama menciptakan aturan dan struktur yang mengatur hubungan mereka dan cara-cara untuk bertindak atau memutuskan masalah bersama. Ini berarti suatu proses yang melibatkan norma-norma bersama dan interaksi yang saling menguntungkan. Berdasarkan definisi tersebut ada lima dimensi kunci kolaborasi yaitu:

1. *Governance* (pemerintahan): Para pihak yang berkolaborasi harus memahami bagaimana cara untuk bersama-sama membuat keputusan tentang aturan-aturan yang akan mengatur perilaku dan hubungan bersama.
2. *Administration* (administrasi): Kolaborasi bukanlah usaha *self administering*. Organisasi berkolaborasi karena mereka berniat untuk mencapai tujuan tertentu. Struktur administratif tersebut berbeda secara konseptual dari pemerintahan mereka karena kurang berfokus atas persediaan kelembagaan dan lebih pada implementasi dan manajemen apa

yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan melalui sistem operasi yang efektif serta mendukung kejelasan peran dan saluran komunikasi yang efektif.

3. *Organizational Autonomy* (otonomi organisasi): Dimensi kolaborasi ini menjelaskan dua dinamika potensial dan kekecewaan yang tersirat dalam upaya kolaboratif. Para mitra pada kenyataan berbagi identitas ganda. Mereka mempertahankan identitas yang berbeda dan wewenang organisasi yang dipisahkan dari identitas kolaboratif.
4. *Mutualisme* (Kebersamaan): Kebersamaan berakar pada saling ketergantungan. Organisasi yang berkolaborasi harus saling ketergantungan pada hubungan yang saling menguntungkan didasarkan atas perbedaan kepentingan atau kepentingan bersama.
5. *Norms* (norma): Timbal balik dan kepercayaan, terkait erat secara konseptual.

B. Pengertian Pemerintah Daerah

Secara istilah pemerintahan atau dalam bahasa Inggris adalah dari kata *government*. Jadi, Pemerintahan adalah lembaga atau badanbadan publik yang mempunyai melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara (Zaidan Nawawi, 2013). pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat di katakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu Negara (daerah Negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu Negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah.

Menurut Syafie (2002) bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan kepengurusan (eksekutif), kepengurusan (legislatif), kepemimpinan dan kordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Sedangkan Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pertanian adalah :

- a) Pengaturan pemasukan atau pengeluaran benih/bibit dan penetapan pedoman untuk penentuan standar pembibitan/perbenihan pertanian.
- b) Pengaturan dan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida dan bahan kimia pertanian lainnya, obat hewan, vaksin, sera, antigen, semen beku dan embrio ternak.
- c) Penetapan standar pelepasan dan penarikan varietas komoditas pertanian.
- d) Penetapan pedoman untuk penentuan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan

terpadu.

- e) Penetapan norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan.
- f) Penetapan standar dan prosedur pengujian mutu bahan pangan nabati dan hewani.
- g) Penetapan norma dan standar teknis pemberantasan hama pertanian.
- h) Pengaturan dan penetapan norma dan standar teknis pelayanan kesehatan hewan.

C. Pengertian Kelompok Tani

Kelompok tani merupakan lembaga yang menyatukan para petani secara horizontal, dan dapat dibentuk beberapa unit dalam satu desa, kelompok tani juga dapat dibentuk berdasarkan komoditas, areal pertanian, dan gender. Pembangunan kelompok tani dilatarbelakangi oleh kenyataan kelemahan petani dalam mengakses berbagai kelembagaan layanan usaha, misalnya lemah terhadap lembaga keuangan, terhadap lembaga pemasaran, terhadap lembaga penyedia sarana produksi pertanian serta terhadap sumber informasi (Saptana dan dkk, 2004).

Kelompok tani merupakan lembaga yang menyatukan para petani secara horizontal dan vertikal (Suradisastra, 2008). Berbagai kesalahan dalam pengembangan kelembagaan selama ini yaitu hampir tiap program pembangunan dan pengembangan masyarakat pedesaan membentuk satu kelembagaan baru. Sebagian besar kelembagaan dibentuk lebih untuk tujuan mendistribusikan bantuan dan memudahkan tugas kontrol bagi

pelaksana program, bukan untuk pemberdayaan masyarakat secara nyata. Setiap program satu organisasi yang baru dengan nama yang khas, jarang sekali dari dinas tertentu menggunakan kelompok yang sudah ada. Igan kelembagaan hanya dengan dukungan material yang cukup tapi tidak dibina bagaimana mengelolanya dengan manajemen yang baik. Walaupun kelembagaan telah dijadikan alat yang penting dalam menjalankan suatu program, namun penggunaan strategi pengembangan kelembagaan banyak mengalami ketidaktepatan dan kekeliruan (Syahyuti, 2003).

Secara konseptual tiap kelembagaan petani yang dibentuk dapat memainkan peran tunggal ataupun ganda. Khusus untuk kegiatan ekonomi, terdapat banyak lembaga pedesaan yang diarahkan sebagai lembaga ekonomi, diantaranya adalah kelompok tani, koperasi dan kelompok usaha agribisnis. Secara konseptual masing-masing dapat menjalankan peran yang sama (tumpang tindih). Berdasarkan konsep sistem agribisnis, aktivitas pertanian pedesaan tidak akan keluar dari upaya untuk menyediakan sarana produksi (benih, pupuk dan obat-obatan), permodalan usahatani, pemenuhan tenaga kerja, kegiatan berusaha tani (*on farm*), pemenuhan informasi dan teknologi serta pengolahan dan pemasaran hasil panen (Syahyuti, 2003).

Pengertian kelompok tani tidak bisa dilepaskan dari pengertian kelompok itu sendiri. Menurut Mulyana (2005) kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Kelompok pada dasarnya adalah gabungan dua

orang atau lebih yang berinteraksi untuk meneapai tujuan bersama, dimana interaksi yang terjadi bersifat relatif tetap dan mempunyai struktur tertentu. Menurut Polak (2001) maksud struktur sebuah kelompok adalah susunan dari pola antar hubungan intern yang agak stabil, yang terdiri atas:

1. Suatu rangkaian status-status atau kedudukan-kedudukan para anggotanya yang hirarkis.
2. Peranan-peranan sosial yang berkaitan dengan status-status itu;
3. Unsur-unsur kebudayaan (nilai-nilai), norma-norma, yang mempertahankan, membenarkan dan mengagungkan struktur.

Menurut Soerjono (1986) ada beberapa hal yang harus menjadi ciri kelompok yaitu; setiap anggota kelompok harus sadar sebagai bagian dari kelompok ada hubungan timbal balik antara sesama anggota, dan terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh para anggota sehingga hubungan diantara mereka semakin kuat. Adapun ciri-ciri kelompok menurut (Winardi, 2004):

1. Ada interaksi antar anggota yang berlangsung secara kontinyu untuk waktu yang relatif lama.
2. Setiap anggota menyadari bahwa ia merupakan bagian dari kelompok, dan sebaliknya kelompoknyapun mengakuinya sebagai anggota.
3. Adanya kesepakatan bersama antar anggota mengenai norma-norma yang berlaku, nilai-nilai yang dianut dan tujuan atau kepentingan yang akan dicapai.
4. Adanya struktur dalam kelompok, dalam arti para anggota mengetahui

adanya hubungan-hubungan antar peranan, norma tugas, hak dan kewajiban yang semuanya tumbuh di dalam kelompok itu.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dijelaskan bahwa Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. Dalam rangka pembangunan sub sektor pertanian, kelompok tani adalah sebagai berikut: anggota pengurus kelompok tani pertanian, baik yang merupakan kegiatan maupun kegiatan pembangunan swadaya. Merupakan pengorganisasian petani yang mengatur kerjasama dan pembagian tugas anggota maupun pengurus kegiatan usahatani kelompok di hamparan kebun. Besaran kelompok tani disesuaikan dengan jenis usahatani dan kondisi di lapangan, dengan jumlah anggota berkisar 20-30 orang. Keanggotaan kelompok tani bersifat non formal. Pemilihan pengurus tiap kelompok tani dan anggotanya dilakukan secara musyawarah sehingga diperoleh kesepakatan kelompok dan dukungan masyarakat dan instansi terkait. Kepengurusan kelompok tani minimal terdiri dari Ketua, Sekeretaris Bendahara serta dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kelompok. Adapun Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Kelompok Tani adalah:

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan usahatani.
2. Wajib mengikuti dan melaksanakan petunjuk pengurus kelompok tani dan petugas penyuluh serta kesepakatan yang berlaku.

3. Wajib bekerja sama dan akrab antar sesama anggota, pengurus maupun dengan petugas penyuluh.
4. Hadir pada pertemuan berkala dan aktif memberikan masukan, saran dan pendapat demi berhasilnya kegiatan usaha tani kelompok.

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Kelompok Tani.

1. Membina kerjasama dalam melaksanakan usahatani dan kesepakatan yang berlaku dalam kelompok tani. Dalam hal ini pengurus melakukan koordinasi terhadap anggota dengan mengidentifikasi jumlah anggota kelompok tani yang bertambah atau berkurang.
2. Wajib mengikuti petunjuk dan bimbingan dari petugas/penyuluh untuk selanjutnya diteruskan pada anggota kelompok. Pengurus wajib menyampaikan informasi yang disampaikan oleh penyuluh kepada kelompok taninya. Bersama petugas/ penyuluh membuat rencana kegiatan kelompok dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran dan lain-lain. Mendorong dan menggerakkan aktivitas, kreativitas dan inisiatif anggota. Yakni dengan menumbuhkan swadaya dan swakarsa anggota. Secara berkala, minimal satu bulan sekali mengadakan pertemuan/ musyawarah dengan para anggota kelompok yang dihadiri oleh petugas/penyuluh. Dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada anggota, selanjutnya membuat rencana dan langkah perbaikan, (Anonimous,2007).

D. Kerangka Pikir

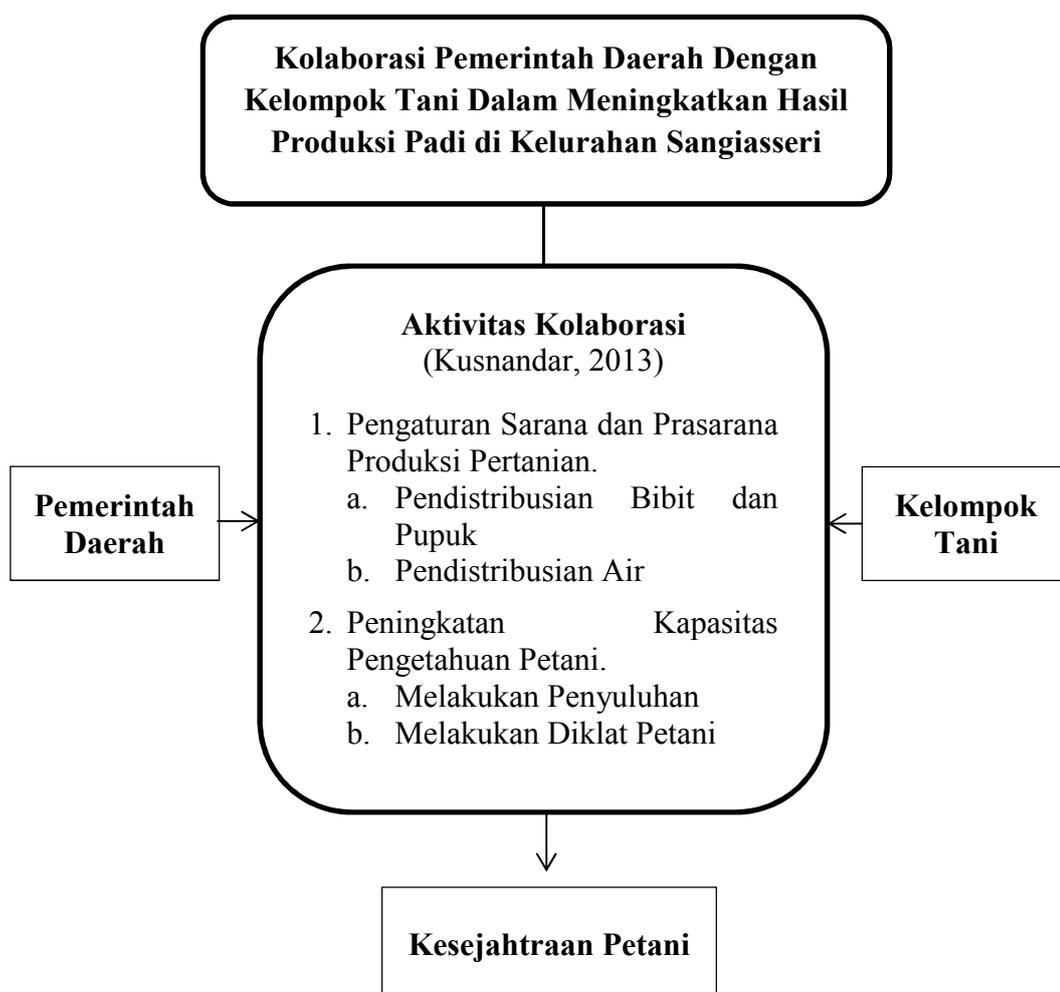
Kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat diperlukan untuk kelompok tani sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Karena pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berada didalamnya. Apabila sumber daya manusia memiliki motivasi tinggi, kreativitas dan mampu mengembangkan inovasi, maka pembangunan pertanian dapat dipastikan semakin baik. Oleh karena itu perlu diupayakan kolaborasi pemberdayaan kelompok tani untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Artinya suatu peningkatan kemampuan yang sesungguhnya potensinya ada. Dimulai dari status kurang berdaya menjadi lebih berdaya, sehingga lebih bertanggung jawab.

Pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran serta kelompok tani yang sekaligus merupakan pelaku pembangunan pertanian. Dengan peran yang sangat penting sebagai pemutar roda perekonomian Negara Indonesia, khususnya di Kabupaten Sinjai, maka perlunya pemberdayaan kelompok tani sehingga petani mempunyai "*power*" yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Pemerintah melakukan kolaborasi kepada kelompok tani sehingga meningkatkan kemampuan dan keterampilan kelompok tani untuk mampu mandiri dan bisa meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pertanian dan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk meningkatkan pengetahuan kapasitas petani dan pengadaan sarana dan prasarana pertanian. Kolaborasi Pemerintah dalam menjalankan proses pemberdayaan kelompok tani untuk meningkatkan hasil produksi yang lebih baik.

Untuk memudahkan pemahaman dari penjelasan diatas maka penulis merumuskan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut :

Bagan Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini mengenai Kolaborasi Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Padi di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

1. Kolaborasi pemerintah daerah dengan kelompok tani di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.
2. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan hasil produksi padi di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Kolaborasi dalam penelitian ini adalah peran Pemerintah Daerah dengan Kelompok Tani dalam meningkatkan hasil produksi padi. Salah satu upaya pemerintah untuk lebih memperhatikan pentingnya peningkatan produksi padi di Kelurahan Singiasserri Kecamatan Sinjai Selatan dengan segala kendala yang dihadapi. Meski disadari bahwa budaya masyarakat di Kecamatan Sinjai Selatan tidak terlepas dari bentuk bercocok tanam sejak nenek moyang terdahulu tetapi tetap mampu meningkatkan hasil produksi padi sebagai salah satu tanaman pangan penghasil beras yang diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi petani padi . Adapun deskripsi fokus penelitian penulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, mencakup :

1. Kolaborasi Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah dinas pertanian yang saling berinteraksi dengan kelompok tani dalam memecahkan masalah dalam bidang peningkatan produksi padi.

2. Kolaborasi pemerintah daerah dengan kelompok tani yang dimaksud adalah pengaturan sarana dan pengaturan prasarana produksi pertanian adalah yang dapat menunjang kelancarannya.
3. Peningkatan kapasitas pengetahuan petani yaitu pemberian berbagai teknik untuk meningkatkan keterampilan kelompok tani dalam bertani sehingga mampu mandiri dan meningkatkan kesejahteraannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu dalam melakukan penelitian ini dilaksanakan dua bulan, yang dimana objek penelitian dilaksanakan dikelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan dikelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten, karena di daerah tersebut terdapat banyak kelompok tani yang bergabung dalam menyiasati atau bersatu dalam memecahkan masalah yang ada pada mereka.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif penelitian yang bermaksud memahami Kolaborasi Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Padi di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang berkaitan dengan objek penelitian tentang bagaimana membuat, menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi yang timbul di lapangan Dengan menetapkan fokus pada masalah peranan dinas pertanian dalam

pemberdayaan kelompok tani yang akan diteliti diharapkan nantinya peneliti akan mendapat data yang maksimal untuk menggambarkan fenomena aktual yang terjadi.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari dua sumber, yaitu :

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan yang bersumber dari informan, dengan memakai teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, serta melakukan observasi (pengamatan langsung).

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung bagi data primer yang diperoleh dari bahan-bahan literatur seperti dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti dan sesuai dengan tujuan penelitian serta direncanakan secara sistematis juga dapat dikontrol reliabilitas dan

validitasnya.

2. Wawancara mendalam yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara bertanya langsung atau dengan mengadakan proses tanya jawab, dialog atau percakapan dengan informan yang dipilih untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam terkait dengan masalah yang akan diteliti
3. Studi pustaka yaitu pengambilan data dengan membaca literatur atau hasil-hasil penelitian yang relevan dengan Kolaborasi Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Padi di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

E. Informan Penelitian

Informan yang terpilih dalam penelitian adalah pihak-pihak yang dianggap mengetahui betul tentang data yang terkait dengan kolaborasi pemerintah daerah dengan kelompok tani dalam meningkatkan produksi padi adalah sebagai berikut:

3.1 Tabel Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Dinas Pertanian Kab.Sinjai	1 Orang
2	Penyuluh Pertanian Lapangan Singasseri	1 Orang
3.	Kepala Kelurahan Singaseri	1 Orang
4.	Ketua Kelompok Tani	3 Orang
5.	Anggota Kelompok Tani	3 Orang

F. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/ verification*, setelah melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan *anticipatory* sebelum melakukan reduksi data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten mengenai Kolaborasi Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Padi di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

G. Keabsahan Data

Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut :

1. Perpanjangan Masa Penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menghubungi

kembali para informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan.

2. Pencermatan Pengamatan

Data yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan dengan secara cermat apa yang terjadi dilapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

3. Triangulasi

Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu:

- a. Triangulasi Sumber yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
- b. Triangulasi Teknik yaitu Pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidak akuratannya.
- c. Triagulasi Waktu yaitu Triagulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kelurahan Sangiasseri

a. Keadaan Alam dan Geografis

1) Letak Wilayah

Kelurahan Sangiasseri merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terdiri dari 5 lingkungan yaitu Lingkungan Babara, Lingkungan Caile, Lingkungan Samaenre, Lingkungan Bolaromang dan Lingkungan Cappagalung.

2) Batas Wilayah

Kelurahan Sangiasseri mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Alenangka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Palangka
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Puncak
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Saotenga

3) Letak Geografis

Secara geografis Kelurahan Sangiasseri berada di daerah dataran tinggi. Sepanjang tahun daerah ini beriklim sub tropis yang mengenal dua musim, yaitu musim penghujan pada periode April sampai Oktober, dan musim kemarau yang berlangsung pada bulan Oktober sampai April. Luas wilayah Kelurahan Sangiasseri yaitu 13.229 Km², terdiri dari persawahan, perkebunan dan pemukiman. Secara umum kondisi tanah di

Kelurahan Sangiasseri memiliki tekstur tanah gembur dan subur berbagai jenis tanaman dapat tumbuh baik berupa tanaman padi, palawija maupun tanaman jangka panjang.

b. Kependudukan

Penduduk merupakan komponen utama dalam suatu wilayah. Wilayah tidak akan berkembang jika tidak ada penduduk, karena penduduk menjadi pengelola dari potensi masing-masing wilayah. Kelurahan Sangiasseri merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Sinjai Selatan dengan jumlah penduduk 7.981 jiwa atau 1.701 KK, penduduk laki-laki sebanyak 3.872 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 4.109 jiwa. Penduduk ini tersebar di 5 Lingkungan dengan rincian sebagai berikut: Lingkungan Babara sebanyak 1.388 jiwa, Lingkungan Caile sebanyak 1.851 jiwa, Lingkungan Samaenre sebanyak 1.515 jiwa, Lingkungan Bolaromang sebanyak 2.388 jiwa dan Lingkungan Cappagalung sebanyak 839 jiwa.

c. Mata Pencaharian

Jumlah penduduk Kelurahan Sangiasseri menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kelurahan Sangiasseri

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	219
2.	ABRI	5
3.	Swasta	207
4.	Wiraswasta/Pedagang	220
5.	Tani	2.663
6.	Pertukangan	28
7.	Buruh Tani	330

8.	Pensiunan	94
9.	Jasa	39
	Total	3.805

Sumber: Profil Kelurahan Sangiasseri Tahun 2018.

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa di Kelurahan Sangiasseri jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian yaitu 3.805 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 219 orang, ABRI berjumlah 5 orang, Swasta berjumlah 207, Wiraswasta/Pedagang berjumlah 220 orang, Tani berjumlah 2.663 orang, Pertukangan 28 orang, Buruh Tani 330 orang, Pensiunan 94 orang dan Jasa 39 orang.

d. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam sebuah wilayah merupakan sebagai alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik. Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses.

1) Sarana

a) Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Sarana pemerintahan dan pelayanan umum merupakan sarana penunjang untuk membantu masyarakat dalam melayani kebutuhan dan permasalahan yang berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak.

Tabel 4.2
Jumlah Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kelurahan Sangiasseri

No.	Sarana Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Jumlah
1.	Kantor Kecamatan	1
2.	Kantor Kelurahan Sangiasseri	1
3.	Kantor Urusan Agama	1
	Jumlah	3

Sumber: *Profil Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan tahun 2018.*

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa di Kelurahan Sangiasseri terdapat fasilitas pemerintahan berupa Kantor Kecamatan Sinjai Selatan dan Kantor Urusan Agama merupakan kantor pelayanan publik yang melayani seluruh kelurahan dan desa yang tersebar di Kecamatan Sinjai Selatan. Sedangkan Kantor Kelurahan Sangiasseri untuk pelayanan publik terdapat di lingkungan Kelurahan Sangiasseri.

b) Sarana Pendidikan

Fasilitas pendidikan dibutuhkan oleh daerah bukan hanya di daerah perkotaan namun juga di daerah pedesaan jika sudah memenuhi kriteria untuk tersedianya fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan adalah salah satu sumber yang menjadi tolak ukur mutu sekolah.

Tabel 4.3
Jumlah Saran Pendidikan di Kelurahan Sangiasseri

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah (Unit)
1.	Sekolah PAUD	1
2.	Taman Kanak-Kanak (TK)	3
3.	Sekolah Dasar (SD)	6
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3
5.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2
	Jumlah	15

Sumber: *Monografi Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan tahun 2018.*

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa di Kelurahan Sangiasseri terdapat 15 gedung sekolah yang terdiri dari PAUD, 3 Taman Kanak-Kanak (TK), 6 Sekolah Dasar (SD), 3 Sekolah menengah Pertama (SMP) dan 2 Sekolah Menengah Atas (SMA).

c) Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam masyarakat karena menyangkut kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan hidup, serta perilaku hidup sehat dan bersih. Di Kelurahan Sangiasseri ketersediaan sarana kesehatan cukup memadai karena terdapat puskesmas, yang merupakan salah satu sarana kesehatan terbesar di Kecamatan Sinjai Selatan dan merupakan sarana utama masyarakat untuk memeriksakan kesehatan. Terletak tidak jauh dari kantor camat dan kantor lurah yang dilintasi oleh jalan poros, sehingga mudah terjangkau oleh masyarakat yang ingin berobat atau memeriksa kesehatan di puskesmas.

Tabel 4.4
Jumlah Sarana Kesehatan di Kelurahan Sangiasseri

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1.	Puskesmas	1
2.	Posyandu	5
3.	Poliklinik/Balai Pelayanan masyarakat	1
	Jumlah	7

Sumber: Monografi Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan tahun 2018.

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa di Kelurahan Sangiasseri terdapat 7 unit sarana kesehatan yang terdiri dari 1 Puskesmas, 5 Posyandu dan 1 Poliklinik/Balai Pelayanan Masyarakat.

d) Sarana Olahraga dan Sarana Peribadahan

Adanya sarana olahraga merupakan fasilitas penunjang bagi setiap masyarakat yang memiliki minat di bidang olahraga. Jumlah sarana olahraga di Kelurahan Sangiasseri ada 14 buah. Dan sarana pibadahaan di Kelurahan Sangiasseri terdapat 16 Mesjid dan 4 Mushola.

2) Prasarana

Prasarana merupakan kelengkapan dasar fisik atau sistem yang memungkinkan bangunan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi prasarana adalah untuk melayani dan mendorong terwujudnya lingkungan usaha yang optimal sesuai dengan fungsinya.

a) Sistem Transportasi

Sistem transportasi merupakan suatu sistem yang sangat penting bagi masyarakat untuk membantu melancarkan aktivitasnya di luar rumah. Sistem transportasi yang ada di Kelurahan Sangiasseri sudah tergolong efektif dan efisien yaitu terdiri dari kendaraan pribadi berupa motor dan mobil serta ojek dan angkutan umum.

b) Kondisi jalan di Kelurahan Sangiasseri tergolong baik. Terutama jalan poros yang menghubungkan antara Kota Sinjai dengan Kota Bulukumba.

c) Jaringan air bersih

Kelurahan Sangiasseri secara umum masyarakat memperoleh dari mata air selain itu saat ini mulai dilakukan pemasangan pipa

PDAM di setiap rumah warga yang dilakukan secara bertahap sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan air saat musim kemarau.

d) Jaringan Listrik

Bentuk penyediaan energi listrik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sarana energi dan penerangan, di Kelurahan Sangiasseri sudah menerima pelayanan dan pengembangan listrik.⁴

e) Jaringan Komunikasi

Adanya tower telpon alat komunikasi inilah yang banyak digunakan masyarakat yang ada di Kelurahan Sangiasseri karena alat komunikasi memiliki akses telekomunikasi yang baik dan dengan sendirinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e) Sarana Kebersihan

Di Kelurahan Sangiasseri pengelolaan sampah hanya dilakukan oleh setiap rumah tangga dengan cara dibakar.

e. Pemerintahan dan Kelembagaan Kelurahan

1) Visi dan Misi Kelurahan Sangiasseri

- Visi

Terwujudnya Kelurahan Sangiasseri yang mandiri dan sejahtera melalui pembangunan partisipatif, demogratif dan beradab.

- Misi

a) Meningkatkan profesionalisme aparat kelurahan

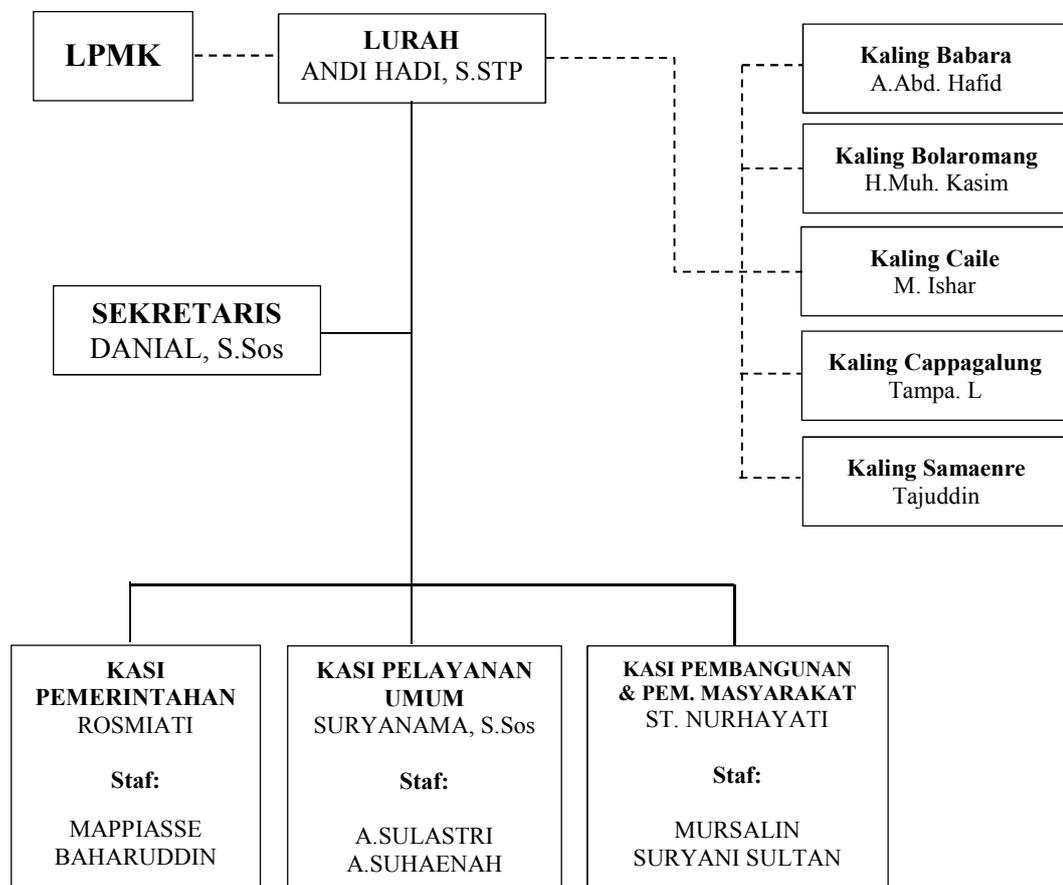
b) Pengutan lembaga kemasyarakatan

c) Meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat

2) Pemerintah Kelurahan dan Kelembagaan Masyarakat

Kelurahan Sangiasseri memiliki fungsi yang sangat penting terhadap kepentingan pelayanan masyarakat. Terutama hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Struktur kepemimpinan Kelurahan Sangiasseri dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Sangiasseri



Sumber: Monografi Kelurahan Sangiasseri, 2018

Berdasarkan gambar diatas adanya struktur ini menunjukkan bahwa secara umum pelayanan pemerintahan di Kelurahan Sangiasseri sudah cukup baik dalam memberikan pelayanan, ini dapat dilihat dengan adanya sekretaris dan dibantu oleh kepala seksi pemeritahan beserta

stafnya, kepala seksi pelayanan umum beserta stafnya dan kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat beserta stafnya serta tentunya selalu bersinergi dengan kepala lingkungan yang tersebar di kelurahan Sangiasseri dalam melakukan pelayanan, contohnya dalam mengurus persuratan dikerjakan dengan cepat.

Adapun lembaga yang berada diluar struktur pemerintah Keelurahan Sangiasseri namun tetap memiliki koordinasi terhadap lembaga pemerintahan kelurahan Sangiasseri, yaitu sebegaii berikut :

Lembaga-lembaga yang ada di Kelurahan Sangiasseri terdiri dari :

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Jumlah pengurus : 3 orang

Jumlah anggota : 6 orang

b. Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Jumlah pengurus : 13 orang

Jumlah anggota : 20 orang

c. Karang Taruna

Jumlah karang taruna : 1 buah

Jenis karang taruna : Kepemudaan

Jumlah pengurus : 20 orang

d. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

1. Gabungan Kelompok Tani Sangiassri

Jumlah pengurus : 57 Orang

B. Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Kelompok Tani dalam Meningkatkan Hasil Produksi Padi di Kelurahan Sangiasseri.

Kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing, (Kusnandar,2013). Kolaborasi pemerintah daerah dengan kelompok tani dalam meningkatkan hasil produksi padi yang meliputi pengaturan sarana dan prasarana serta peningkatan pengetahuan pertanian bertujuan agar para kelompok tani bisa sejahtera, menjadi lebih mandiri dan lebih mudah dalam meningkatkan potensi serta kuliatas pertanian yang dikelola. Pembangunan pertanian sehingga harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pertanian dan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Dinas pertanian merupakan instansi pemerintah daerah yang diharapkan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal terutama dalam melakukan pemberdayaan kelompok tani. Pemberian bantuan tentunya sangat dibutuhkan oleh kelompok tani.

Kelompok tani yang terdaftar di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan berjumlah 27 kelompok tani dan tersebar di lima lingkungan yaitu Lingkungan Babara sebanyak 6 kelompok tani, Lingkungan Caile Sebanyak 8 kelompok tani, Lingkungan Samaenre sebanyak 3 kelompok tani, Lingkungan Bolaromang sebanyak 7 kelompok tani, dan Lingkungan Cappa Galung

Sebanyak 3 Kelompok tani. Mayoritas kelompok tani menggarap sawah dan kebun. Adapun luas lahan garapan kelompok tani di kelurahan Sangiasseri yaitu sekitar 600.00 Ha sawah dan sekitar 217.11 Ha Kebun. Berikut ini beberapa kolaborasi pemerintah daerah dalam hal ini dinas pertanian dengan kelompok tani dalam meningkatkan produksi padi dikelurahan Sangiasseri.

1. Pengaturan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian.

Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian dengan Kelompok Tani dalam Pengaturan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian adalah situasi atau keadaan lembaga sekarang ini dalam artian bagaimana kondisi atau keadaan kelompok tani yang ada di Kelurahan Sangiasseri atau bagaimana tingkat keterberdayaan kelompok tani dalam meningkatkan produksi padi yang ada di Kelurahan Sangiasseri. Berikut ini beberapa pengaturan sarana dan prasarana dalam meningkatkan produksi padi dikelurahan Sangiasseri :

a. Pendistribusian Bibit dan Pupuk

Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Hasil Produksi Padi di Kelurahan Sangiasseri yakni Dinas Pertanian memberikan atau menyalurkan bantuan baik berupa bibit dan pupuk kepada kelompok tani. Tujuannya yaitu agar para petani yang tergabung dalam kelompok tani tersebut bisa meningkat hasil produksi pertaniannya. Keadaan pendistribusian bibit dan pupuk biasanya dari Dinas Pertanian menyalurkan melalui Gapoktan yang selanjutnya diberikan kepada kelompok tani.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kepala/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Sinjai Selatan terkait dengan pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada kelompok tani :

“Jadi terkait dengan pemberian bantuan bibit maupun bantuan pupuk kepada kelompok tani itu setiap tahunnya kami dari Dinas Pertanian memberikan bantuan tersebut secara bergiliran kepada kelompok tani yang ada di Kelurahan Sangiasseri. Dan bukan cuma di Kelurahan sangiasseri saja diberikan secara bergiliran tapi semua kecamatan yang ada di Sinjai ini. Penyaluran atau pemberiannya itu dilaksanakan menjelang musim tanam, dan melibatkan produsen pupuk dan bibit, pengawas yang sengaja kami tunjuk untuk mengawasi penyaluran bantuan tersebut, serta kelompok tani itu sendiri” (Wawancara dengan Muh. Yasin, SP 27 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Sinjai Selatan terkait dengan peranan dinas pertanian dalam pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada kelompok tani maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian telah memberikan bantuan bibit dan pupuk kepada kelompok tani yang ada di Kecamatan Sinjai Selatan secara bergiliran yang melibatkan produsen bibit dan pupuk, pengawas dari Dinas Pertanian, serta kelompok tani itu sendiri.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Penyuluh Pertanian Lapangan Kelurahan Sangiasseri terkait dengan pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada kelompok tani :

“Kami dari Penyuluh Pertanian memberikan bantuan bibit dan pupuk secara gratis kepada kelompok tani di Kelurahan Sangiasseri ini, bantuan ini diberikan melalui ketua kelompok tani secara bergiliran setiap tahunnya dan ini di mendapat pendanaan dari APBN. Mekanismenya yaitu setiap tahunnya ada beberapa kelompok tani yang mendapatkan jatah bantuan bibit dan pupuk meskipun dalam bantuan tersebut masih kurang, kemudian tahun depannya kelompok tani yang belum mendapatkan bantuan itu kita juga berikan bantuan. Dengan adanya bantuan bibit dan pupuk ini kami mengharapakan petani bisa menggunakan bantuan itu sebaik

“mungkin demi meningkatkan hasil produksi pertanian yang mereka kelola” (Wawancara dengan H. Halilintar, SP 29 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyuluh Pertanian Lapangan kelurahan sangiasseri terkait dengan pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada kelompok tani maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian telah memberikan bantuan tersebut kepada kelompok tani secara bergiliran. Dan ini memang yang kita harapkan dengan adanya bantuan seperti itu demi berkembangnya produktivitas pertanian di Kelurahan Sangiasseri.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Lurah Sangiasseri terkait kolaborasi Dinas Pertanian dalam pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada kelompok tani di Kelurahan Sangiasseri :

“Kami dari pemerintah Kelurahan Sangiasseri tidak mempunyai wewenang untuk mengatur penyaluran dan pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada kelompok tani yang ada di Kelurahan Sangiasseri ini karena sudah ada Dinas Pertanian yang mengatur tentang hal tersebut. Tetapi karena kelompok tani ini berada di wilayah kami, maka kami melakukan monitoring kepada kelompok tani ini. Kami selalu mengawasi penyaluran bantuan yang ada untuk petani, dan saya melihat Dinas Pertanian telah memberikan bantuan berupa bibit dan pupuk kepada kelompok tani yang ada di wilayah Kelurahan Sangiasseri ini. Dan saya berharap bantuan seperti bibit dan pupuk ini lebih di perbanyak lagi. (Wawancara dengan Andi Hadi 28 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian telah melaksanakan peranannya meskipun dalam pemberian bantuan bibit dan pupuk itu masih kurang atau perlu diperbanyak lagi. Demikianlah hasil wawancara dengan lurah sangiasseri terkait dengan peranan Dinas Pertanian dalam pemberian bantuan bibit dan pupuk.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan salah Ketua Kelompok tani yang ada di Kelurahan Sangiasseri yaitu ketua kelompok tani Borong Paoe terkait kolarasi Dinas Pertanian dalam pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada kelompok tani:

“Jadi semenjak saya menjadi ketua kelompok tani disini itu sudah beberapa kali kelompok tani Borong Paoe ini mendapatkan bantuan baik berupa bibit seperti benih, dan pupuk yang diberikan oleh Dinas Pertanian tetapi itu masih kurang bagi kami karena jumlah bantuan tersebut saya anggap masih sedikit karena biasanya kalau benih atau bibit itu cuma mendapat 20 kantong yang berisi benih padi, kemudian pupuk kami biasa mendapatkan sekitar 10 sak dan itu juga harus dibagi rata dengan semua anggota kelompok tani. itupun kami tidak selamanya mendapat bantuan itu karena digilir setiap tahunnya” (Wawancara dengan Renggang 29 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok tani di kelurahan Sangiasseri terkait dengan peranan Dinas Pertanian dalam pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada kelompok tani maka dapat disimpulkan bahwa Kelompok tani tersebut telah mendapatkan bantuan bibit dan pupuk dari Dinas Pertanian tetapi jumlahnya masih kurang atau sedikit.

Sementara itu ketua kelompok tani Pemuda Tani Harapan Kita juga memberikan pernyataan terkait peranan Dinas Pertanian dalam pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada kelompok tani :

“Kami disini musim lain pernah mendapat bantuan berupa bibit atau benih padi dari Dinas Pertanian sebanyak 15 kantong dan kami bagi dengan para anggota kelompok, kemudian pupuk juga kami pernah dapat sebanyak 15 sak juga pada saat musim tanam. Tentu ini membantu kami dari petani dan kami harap kepada pemerintah agar banyak bantuan yang diberikan kepada kelompok tani” (Wawancara dengan Mappabiring 30 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ketua kelompok tani terkait dengan peranan Dinas Pertanian dalam pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada kelompok tani dapat disimpulkan bahwa kelompok tani Pemuda Tani Harapan Kita pernah mendapatkan bantuan bibit berupa benih padi serta pupuk dari Dinas Pertanian dan berharap jumlah bantuannya diperbanyak.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan ketua kelompok tani Ulu Galung terkait dengan kolaborasi Dinas Pertanian dalam pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada kelompok tani :

“Kelompok tani Ulu Galung ini pernah mendapat bantuan berupa pupuk Urea sebanyak 10 sak, tetapi untuk tahun ini mungkin kami tidak mendapat karena kami biasa diberikan secara bergiliran. Saya berharap agar bisa setiap tahun diberikan pupuk supaya bisa mengurangi biaya kami, meskipun kami masih tetap membeli lagi di penjual pupuk karena yang dari Dinas Pertanian belum mencukupi kami” (Wawancara dengan Baharuddin 1 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ketua kelompok tani terkait dengan peranan Dinas Pertanian dalam pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada kelompok tani maka dapat disimpulkan bahwa kelompok tani Ulu Galung ini sudah pernah mendapatkan bantuan berupa pupuk Urea 10 sak, mereka berharap agar Dinas pertanian setiap tahunnya bisa memberikan bantuan berupa pupuk tersebut karena dapat membantu mengurangi beban biaya dari anggota kelompok tani.

Sementara itu ditempat lain Anggota kelompok tani Borong Paoe juga memberikan pernyataan terkait dengan peranan Dinas Pertanian dalam pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada kelompok tani:

“Kalau kelompok tani disini itu waktu sebelum musim tanam baru-baru ini dapat bantuan bibit padi 20 kantong dan itu yang kami tanam ditambah dengan bibit yang sengaja disimpan untuk benih” (Wawancara dengan Ahmad 1 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Anggota Kelompok tani terkait dengan peranan Dinas Pertanian dalam pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada kelompok tani maka dapat disimpulkan bahwa salah satu kelompok tani baru-baru ini mendapatkan bantuan berupa bibit atau benih padi dari Dinas Pertanian.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan salah satu anggota kelompok tani di kelurahan Sangiasseri terkait peranan Dinas Pertanian dalam pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada kelompok tani:

“Jadi kalau saya melihat ini bantuan bibit dan pupuk dari pemerintah kita sebagai petani sangat senang, tetapi saya melihat masih sangat kurang jadi kita petani masih membeli bibit dan pupuk untuk menambah bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Ketika kami tidak membeli lagi maka tidak akan mencukupi, terus ini bantuan tidak setiap tahun diberikan oleh pemerintah. Jadi harapan saya agar bisa setiap tahun ada bantuan bibit dan pupuk diberikan oleh pemerintah” (Wawancara dengan Tampa L 29 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota kelompok tani di kelurahan Sangiasseri terkait peranan Dinas Pertanian dalam pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada kelompok tani maka dapat disimpulkan bahwa anggota kelompok tani sangat merasa senang dengan adanya bantuan bibit dan pupuk yang diberikan oleh Dinas Pertanian tetapi dinilai masih kurang jadi petani masih harus membeli lagi untuk menutupi bantuan yang diberikan tersebut. Harapan petani yaitu agar Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian agar menambah jumlah

bantuan bibit dan pupuk serta berharap bantuan itu didapatkan setiap tahunnya.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan salah satu anggota kelompok tani Pemuda Tani Harapan Kita terkait dengan peranan Dinas Pertanian dalam pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada kelompok tani :

“Kami terbantu dengan adanya bantuan bibit dan pupuk dari dinas pertanian selama saya masuk kelompok tani. Karena ada peningkatan kalau tanaman kita diberi pupuk. Kalau biasanya saya mendapatkan 40 karung gabah, setelah dipupuk itu bisa dapat 50 lebih karung gabah. Jadi harapan nya cuma semoga pak dinas pertanian menambah bantuannya kepada kami karena ini sangat membantu kami, karena masih sedikit jumlahnya” (Wawancara dengan Muhammad Natsir 29 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota kelompok tani maka dapat disimpulkan bahwa petani merasa terbantu dengan adanya bantuan bibit dan pupuk pada kelompok tani karena dengan adanya bantuan tersebut bisa meningkatkan produktifitas pertanian mereka, meskipun jumlah bantuan yang diberikan masih dinilai kurang dari segi kuantitas.

b. Pengadaan dan Pendistribusian Air

Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Hasil Produksi Padi di Kelurahan Sangiasseri yakni Dinas Pertanian melakukan pengadaan dan pendistribusian air kepada kelompok tani. Tujuannya yaitu agar para petani yang tergabung dalam kelompok tani tersebut bisa meningkatkan hasil produksi pertaniannya. Cara pendistribusian air dari Dinas Pertanian melakukan kerjasama dengan

pemerintah terkait untuk membangun irigasi sepanjang kurang lebih 1 Km khusus di daerah Sangiasseri dan mengairi lahan persawah seluas 600 Ha agar sawah yang susah mendapatkan air bisa teraliri dan tidak lagi mengandalkan air hujan karena melihat situasi sekarang curah hujan susah ditembak dan dapat mengalami gagal panen apabila terjadi kemarau berkepanjangan.

Berikut ini hasil wawancara dengan Kepala/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sinjai Selatan, terkait dengan pengadaan atau pendistribusian air di kelurahan Sangiasseri :

“Melihat situasi di kelurahan Sangiasseri dalam proses bertani padi, petani hanya mengandalkan air hujan dalam mengelola lahan sawahnya untuk ditanami padi karena di Sangiasseri sumber air sangat susah apalagi sungai sangat jauh dari area persawahan petani Sangiasseri.” (Hasil wawancara dengan Muh. Yasin, SP Pada tanggal 27 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kelurahan Sangiasseri dalam mengelola area persawahan padi hanya mengandalkan air hujan saja karena sumber air sangat susah begitupun aliran sungai sangat jauh dari persawahan petani yang ada di kelurahan sangiasseri.

Melihat kondisi wilayah kelurahan Sangiasseri dalam pengelolaan lahan sawahnya hanya mengandalkan curah hujan, maka pemerintah dalam hal ini dinas pertanian harus melakukan kolaborasi demi meningkatkan hasil produksi padi di kelurahan sangiasseri dengan cara melakukan pengadaan atau pendistribusian air ke area persawahan. Berikut ini hasil wawancara dengan penyuluh pertanian lapangan

kelurahan sangiasseri dalam melakukan pengadaan atau pendistribusian air:

“Dikelurahan sangiasseri harus melakukan pembagunan irigasi guna petani tidak mengandalkan air hujan dalam mengelola lahan sawahnya. Nah inipun telah dilaksanakan dengan membangun irigasi mulai dari Desa Palangka hingga sampai di Sangiasseri, karena cuman di Palangka yang memungkinkan mengambil aliran air karena daerah tersebut tergolong dataran tinggi dan terdapat sungai yang bisa mengalir ke daerah Sangiasseri” (hasil wawancara dengan H. Halilintar, SP pada tanggal 29 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyuluh Pertanian Lapangan Kelurahan Sangiasseri, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dikelurahan Sangiasseri harus ada irigasi yang mengalir sawah para petani agar mereka dapat mengelola sawahnya tanpa mengandalkan air hujan saja, dengan adanya irigasi yang dibangun mulai dari Desa Palangka yang mengalir hingga di beberapa tempat termasuk dikelurahan Sangiasseri, sehingga dengan adanya irigasi petani yang tergabung dikelompok tani makin antusias dalam melakukan penanaman padi demi meningkatkan kesejahteraan petani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok tani Borong Paoe tentang pengadaan dan pendistribusian air dikelurahan sangiasseri :

“Setelah adanya irigasi yang mengalir sawah kami, kami semakin lebih giat bertani dan meningkatkan produksi padi karena kami tidak mengandalkan lagi air hujan yang saat ini cuaca sangat susah ditembak sehingga mudah mengalami gagal panen karena biasanya terjadi kemarau yang berkepanjangan.” (hasil wawancara dengan Renggang Pada tanggal 29 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya pengadaan dan pendistribusian air dikelurahan

Sangiasseri, kelompok tani lebih serius mengelola sawahnya untuk ditanami padi karena tidak ragu lagi dengan terjadi krisis air apabila terjadi kemarau yang berkepanjangan.

2. Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Petani.

Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Kelompok Tani dalam Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Petani yakni Dinas Pertanian memberikan pendidikan nonformal ataupun pengetahuan yang berkaitan dengan cara-cara berusaha tani yang baik. Kemudian penyuluhan adalah suatu proses yang dilakukan oleh Dinas Pertanian yang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan khusus dari kelompok tani. Pemberdayaan kelompok tani dituntut untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan dalam mengatasi permasalahan ataupun kendala-kendala yang di hadapi oleh para petani yang tergabung dalam kelompok tani. Berikut ini beberapa kolaborasi dalam peningkatan kapasitas pengetahuan petani :

a. Melakukan Penyuluhan

Penyuluhan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan yang memadai dari petani dalam bidang pertanian, memotivasi petani untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pertanian, kemudian menerapkan materi yang diperoleh petani dari penyuluhan tersebut. Oleh karena itu penyuluhan kepada petani sangatlah penting dan perlu untuk dilaksanakan demi pembangunan dan pengembangan di sektor pertanian.

Berikut adalah kutipan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Sinjai Selatan

terkait dengan dalam pemberian penyuluhan kepada kelompok tani di Kelurahan Singaseri:

“saya sebagai Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Sinjai Selatan telah melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pengembangan kapasitas dari kelompok tani dengan cara perumusan kebijakan-kebijakan teknis. Penyuluhan itu sudah terprogram baik di Dinas Pertanian dan sudah dijalankan oleh para penyuluh di tiap-tiap Kelurahan atau Desa yang ada dikecamatan Sinjai Selatan, mengenai waktu pelaksanaannya itu dijadwalkan setiap musim tanam dengan melibatkan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), kelompok tani dan anggotanya di tiap desa. Dan bukan cuma di kecamatan Sinjai Selatan pelatihan dan penyuluhan ini dilaksanakan tetapi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai karena ini sejalan dengan misi kami di Dinas Pertanian yaitu salah satunya memperkuat kelembagaan pertanian” (Wawancara dengan Muh. Yasin, SP 27 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara saya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan pengetahuan dan pengembangan kapasitas kelompok tani maka perlu adanya pemberian penyuluhan kepada kelompok tani. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Sinjai Selatan telah menyusun kebijakan-kebijakan yang didalamnya sudah termasuk melakukan penyuluhan yang dapat membantu petani dalam pengembangan produksi pertanian ketika menerapkan apa yang didapatkan dalam pelatihan dan penyuluhan tersebut.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kelurahan Sangiasseri tentang pelatihan dan penyuluhan :

“Kelompok tani memang merupakan lembaga yang dibentuk untuk lebih mempermudah koordinasi antara pemerintah dan petani maupun komunikasi antar petani sendiri. Kami dibidang PPL merupakan salah satu bidang yang ada di Dinas pertanian yang mempunyai program pelatihan dan penyuluhan kepada kelompok tani. Jadi kami dibidang PPL sudah memberikan pelatihan dan

penyuluhan kepada kelompok tani yang ada di Kelurahan Sangiasseri, terutama dalam bidang pengelolaan lahan dan air. Jadi kami bekerja sama dengan UPTD Dinas Pertanian Kecamatan Sinjai Selatan dalam melaksanakan pelatihan dan penyuluhan ini. Mekanisme nya yaitu kami kumpulkan seluruh kelompok tani yang di koordinir langsung oleh ketua Gapoktan guna mengikuti pelatihan dan penyuluhan di balai pelatihan dan penyuluhan kecamatan Sinjai Selatan” (Wawancara dengan H. Halilintar, SP 29 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Penyuluh Pertanian Lapangan Kelurahan Sangiasseri dapat disimpulkan bahwa salah satu bidang yang ada di dinas pertanian tersebut telah memberikan penyuluhan kepada kelompok tani yang ada di kecamatan Sinjai Selatan. Bidang Penyuluh Pertanian Lapangan memang merupakan bidang yang ditugaskan untuk memberikan pelatihan atau cara pengelolaan lahan dan air.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan ketua kelompok tani Borong Paoe tentang peranan Dinas Pertanian dalam pemberian penyuluhan kepada kelompok tani :

“saya sebagai ketua kelompok tani berterima kasih pada Dinas Pertanian karena sering memberikan penyuluhan kepada kami. Kami banyak mengetahui hal-hal seperti cara tanam yang baik dari pelatihan, karena itu kami mengharapkan agar kegiatan yang seperti ini bisa terus diberikan kepada kami.” (Wawancara dengan Renggang 29 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ketua kelompok tani yang ada di Kelurahan Sangiasseri yaitu ketua kelompok tani Borong Paoe terkait dengan peranan dinas pertanian dalam pemberian penyuluhan kepada kelompok tani maka dapat disimpulkan bahwa kelompok tani Borong Paoe sering diberikan penyuluhan oleh Dinas

Pertanian, dan itu memang yang diharapkan oleh kelompok tani agar kiranya terus diberikan pelatihan dan penyuluhan.

Sementara itu di tempat terpisah ketua kelompok tani Pemuda Tani Harapan Kita (salah satu kelompok tani yang ada di Kelurahan Sangiasseri) memberikan pernyataan terkait kolaborasi Dinas Pertanian dalam pemberian penyuluhan kepada kelompok tani di Kelurahan Sangiasseri:

“Menurut saya Dinas Pertanian telah banyak memberikan penyuluhan kepada kami terutama pada setiap musim tanam maupun musim panen, tetapi masih ada sebagian dari anggota kelompok tani yang tidak mengikuti apa-apa yang didapatkan dari penyuluhan” (Wawancara dengan Mappabiring 30 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ketua kelompok tani yang ada di Kelurahan Sangiasseri tersebut terkait peranan kolaborasi Dinas Pertanian dalam pemberian penyuluhan kepada kelompok tani dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian telah banyak memberikan penyuluhan kepada kelompok tani meskipun dalam pengaplikasian apa-apa yang didapatkan dari pelatihan dan penyuluhan tersebut masih banyak petani yang ada dalam kelompok tani belum mengaplikasikannya.

Kemudian ditempat lain Ketua kelompok tani Ulu Galung (salah satu kelompok tani yang ada di Kelurahan Sangiasseri) juga memberikan tanggapan terkait dengan kolaborasi Dinas Pertanian dalam pemberian penyuluhan kepada kelompok tani :

“Kelompok tani disini sering mengikuti penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian terutama cara bertani, tiap

musim tanam maupun musim panen biasanya ada penyuluh yang datang kepada kami untuk memberikan penyuluhan dan kami sangat terbantu, karena dengan adanya penyuluhan, kami diberikan penjelasan cara bertani misalnya dalam mengelola lahan sawah dan bagaimana takaran pupuk yang digunakan dalam melakukan pemupukan pada tanaman seperti tanaman padi kami, bahkan beberapa sawah dijadikan sebagai sawah percontohan untuk membuktikan materi yang diberikan dalam penyuluhan” (Wawancara dengan Baharuddin 1 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ketua kelompok tani terkait dengan kolaborasi Dinas Pertanian dalam pemberian penyuluhan kepada kelompok tani dapat disimpulkan bahwa kelompok tani sering mendapatkan penyuluhan dari Dinas Pertanian terutama cara bertani dan ini sangat membantu para petani karena adanya materi dan penjelasan kepada petani bahkan beberapa sawah dijadikan percontohan untuk membuktikan teori yang didapatkan dalam penyuluhan dan dalam percontohan ini mengikuti sistem yang dijelaskan dalam penyuluhan.

b. Melakukan Diklat Petani

Dengan adanya Diklat Petani diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan petani yang memadai, dalam bidang pertanian, memotivasi petani untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pertanian, kemudian menerapkan materi yang diperoleh petani dari diklata tersebut. Oleh karena itu pendidikan dan latihan kepada petani sangatlah penting dan perlu untuk dilaksanakan demi pembangunan dan pengembangan di sektor pertanian.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kepala/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Sinjai Selatan terkait dengan peranan dinas

pertanian dalam pemberian pendidikan dan pelatihan kepada kelompok tani :

“Jadi setiap musim tanam kelompok tani yang ada di kecamatan Sinjai Selatan ini mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari Dinas Pertanian baik itu dari Dinas Pertanian Kabupaten maupun kecamatan. Sistem pelatihan itu dinamakan “Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu atau yang biasa disingkat SL-PTT”. Jadi dalam SL-PTT ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari kelompok tani dalam berusaha tani. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelatihan yang kami lakukan kepada kelompok tani ini yaitu narasumber/tim teknis dari Dinas Pertanian Kabupaten Sinjai, saya sendiri sebagai Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, pendamping atau penyuluh karena setiap desa memiliki penyuluh untuk kelompok tani, serta seluruh kelompok tani yang ada di Kecamatan Sinjai Selatan. (Wawancara dengan Muh. Yasin, SP 27 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Kepala/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Sinjai Selatan terkait peran Dinas Pertanian dalam pemberian pelatihan dan penyuluhan kepada kelompok tani maka dapat disimpulkan bahwa kelompok tani yang ada di Kecamatan Sinjai Seltan setiap musim tanam sudah mendapatkan pelatihan dari Dinas Pertanian berupa Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT). Sistem pelatihan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan kelompok tani dalam berusaha tani.

Kelompok tani Borong Paoe juga memberikan pernyataan terkait dengan kolaborasi Dinas Pertanian dalam pemberian pendidikan dan pelatihan terkait peningkatan hasil produksi padi kepada kelompok tani:

“Kami sangat senang dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pertanian karena sangat membantu kami ketika ada masalah seperti menurunnya hasil panen kami dari tahun ketahun yang kami dapatkan dalam proses bertani itu bisa kami tanyakan kepada penyuluh bagaimana jalan keluarnya, maka dijelaskanlah kami cara

bertani padi mulai dari teknik mengelola lahan/tanah, memberi pupuk, memberi racun penghilang hama, bahkan dalam proses panennya. Kerjasama ini biasanya terlaksana dan terbukti karena biasanya ditunjuk beberapa lahan sebagai percontohan dalam bertani padi sehingga materi yang diterima terbukti maka petani lain patut mengikuti teknik itu demi mniktakan hail produksi padinya” (Wawancara dengan Ahmad 1 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota kelompok tani terkait dengan pemberian pelatihan kepada kelompok tani maka dapat disimpulkan bahwa kelompok tani merasa senang dengan adanya pelatihan dan penyuluhan karena mereka sering mendapatkan solusi atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi ketika mengikuti pelatihan maupun penyuluhan seperti masalah menurunnya hasil panen dari tahun ketahun maka pennyuluh memberikan penyuluhan terkait masalah tersebut dengan cara menjelaskan apa penyebabnya dan bagaimana solusinya, ini biasa dipraktekan dengan cara menunjuk beberapa lahan sebagai percontohan.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan anggota kelompok tani Ulu Galung terkait peranan Dinas Pertanian dalam pemberian pelatihan dan penyuluhan:

“Kalau pelatihan sama penyuluhan Alhamdulillah sering jaki ikut disini, biasanya *nakasi kumpuijaki* ketua kelompok (disuruh kumpul oleh ketua kelompok) kalau ada penyuluh mau datang. Merasa *terbantuki* (terbantu) juga kalau ada pelatihan *nakasiki* (yang diberi) penyuluh karena banyak ilmu didapat (yang didapat) disitu” (Wawancara dengan Tampa L 29 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota kelompok tani diatas dapat disimpulkan bahwa anggota kelompok tani sering mengikuti peiatihan dan penyuluhan yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan

biasanya mereka dikumpulkan atau dikoordinir oleh ketua kelompoknya ketika akan dilaksanakan pelatihan dan penyuluhan tersebut.

Sementara itu salah satu anggota kelompok tani Pemuda Tani Harapan Kita juga memberikan tanggapan terkait dengan kolaborasi Dinas Pertanian dalam pemberian pelatihan dan penyuluhan kepada kelompok tani:

“Jadi kalau pelatihan kami biasa dipanggil oleh ketua kelompok tani apabila ada penyuluhan atau diklat yang dilaksanakan dikelurahan atau kita ke kantornya, ini sangat baik saya rasa karena banyak yang diberitahukan kepada petani seperti cara bercocok tanam mulai dari mengolah tanah samapai kami panen” (Wawancara dengan Muhammad Natsir 29 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota kelompok tani terkait dengan kolaborasi Dinas Pertanian dalam pemberian pelatihan dan penyuluhan kepada kelompok tani maka dapat disimpulkan bahwa kelompok tani biasa dipanggil ke kantor Dinas Pertanian atau dikelurahan tergantung dimana dilaksanakan diklat tersebut untuk diberikan pelatihan dan petani merasa sangat senang karena banyak yang diberitahukan dalam pelatihan atau penyuluhan seperti cara bertani padi, jadi kami dijlaskan mulai dari cara mengolah lahan, pendistribusian air, cara menanam biit, takaran memberi pupuk dan cara memberi racun hama agar pertumbuhan padi tidak terhambat atau dimakan hama karena biasanya ini sangat mengganggu tanaman.

C. Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Hasil Produksi Padi di Kelurahan Sangiasseri.

Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Hasil Produksi Padi di Kelurahan Sangiasseri yakni Dinas Pertanian lebih memperhatikan situasi atau keadaan lembaga dalam artian bagaimana kondisi atau keadaan kelompok tani yang ada di Kelurahan Sangiasseri atau bagaimana tingkat keterberdayaan kelompok tani ataukah kelompok tani yang ada di Kelurahan Sangiasseri sudah ada layak dikategorikan kelompok tani mandiri atau belum ada. Tujuannya yaitu agar para petani yang tergabung dalam kelompok tani tersebut bisa meningkatkan hasil produksinya.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sinjai Selatan, terkait dengan kondisi kelembagaan atau tingkat keterberdayaan kelompok tani yang ada di Kelurahan Sangiasseri :

“Menurut saya dek indikator kelompok tani layak dikatakan mandiri antara lain: (1). Kelengkapan buku administrasi (2). Mereka wajib melakukan pertemuan kelompok minimal satu kali sebulan (3). Kelompok tani harus mampu mengakomodir semua anjuran teknis penyuluh artinya dia mampu melaksanakan anjuran teknis yang diberikan penyuluh (4). Dia mampu mengakses modal usaha taninya apakah lewat BRI atau sebagainya (5). Dia mampu mengelolah usaha taninya (6). Dia harus melakukan pemasaran berkelompok bukan per individu (7). Dia mampu bermitra apakah dengan pihak perusahaan maupun swasta” (Wawancara dengan Muh. Yasin, SP 27 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa yang menjadi indikator kelompok tani layak dikatakan mandiri yaitu ketika memenuhi unsur yang diatas dalam artian bahwa kelompok tani harus mempunyai kelengkapan buku administrasi dan lain-lain karena ketika kelompok tani sudah lengkap buku administrasinya berarti bisa dikatakan bahwa kelompok tani itu aktif

dalam mengembangkan usaha taninya dan mereka wajib melakukan pertemuan kelompok minimal satu kali sebulan untuk membahas masalah-masalah yang dihadapinya dalam melakukan usaha taninya sehingga kelompok tani mampu menghadapi masalah-masalah yang ada dalam kelompok tani itu sendiri. Agar kelompok tani mampu memenuhi unsur yang diatas maka dibutuhkan Kolaborasi atau Kerjasama pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan kelompok tani di Kelurahan Sangiasseri sehingga unsur-unsur diatas bisa terpenuhi.

Berikut hasil wawancara dengan ketua kelompok tani, terkait dengan kondisi kelembagaan atau tingkat keterberdayaan kelompok tani yang ada di Kelurahan Sangiasseri :

“Tingkat keterberdayaan kelompok tani yang ada dikelurahan Sangiasseri, terdapat 27 kelompok tani, kalau saya melihat sebagai ketua gapoktan di dikelurahan Sangiasseri, sudah mulai bagus, Alhamdulillah sudah mulai bagus, tingkat keterberdayaan sudah mulai bagus, baru-baru pelatihan persiapan musim tanam. Kalau di Sangiasseri belum ada yang mandiri, dikelurahan sangiasseri kebanyakan kelompok tani Lanjut, Pemula dan madya dan utama belum ada, tapi sekarang sudah mulai lumayan bagus. Karena sekarang ada upaya motivasi pemerintah untuk memperbaikinya dan kelompok tani disini sudah mampu mengelolah usaha taninya sendiri” (Wawancara dengan Baharuddin 1 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kondisi kelembagaan atau tingkat keterberdayaan kelompok tani yang ada di Kelurahan Sangiasseri, sudah mulai bagus ada perubahan, tapi diantara 27 kelompok tani yang ada di Kelurahan Sangiasseri belum ada yang mandiri karena kebanyakan kelompok tani yang ada di Kelurahan Sangiasseri berada pada ketegori pemula, lanjut, dan madya dan ketegori utama belum ada.

Maka kalau berdasarkan indikator yang dijelaskan oleh bapak Muh. Yasin pengawai balai penyuluhan dan ketua gapoktan bapak Baharuddin, untuk menjadi kelompok tani mandiri harus memenuhi indikator diatas. Maka untuk menciptakan kemandirian kelompok tani dibutuhkan kerja keras pemerintah baik Dinas Pertanian maupun Badan Penyuluhan Pertanian terkhusus Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sinjai Selatan, dalam artian bagaimana peran Dinas Pertanian dalam hal memberikan bantuan dana, dan penyediaan sarana dan prasarana kelompok tani yang menunjang dalam melakukan usaha taninya sehingga penghasilan pertanian meningkat dan dapat meningkatkan kesejahterannya para kelompok tani yang ada di Kelurahan Sangiasseri. Begitu juga dengan penyuluh pertanian dalam artian bagaimana penyuluh melakukan pembinaan, pelatihan dan penguatan kelembagaan kelompok tani sehingga terwujudnya kemandirian kelompok tani.

Berikut hasil wawancara dengan anggota kelompok tani, terkait dengan kondisi kelembagaan atau tingkat keterberdayaan kelompok tani yang ada di Kelurahan Sangiasseri :

“Kondisi kelembagaan disini nak, masih jauh dari kata mandiri nak, mungkin karena banyak anggotanya tidak aktif, dan mungkin karena kurang perhatian dari pemerintah dan hasil pertanian belum maksimal mungkin masih kurang pembinaan, dan pelatihan kepada kami sehingga hasil pertanian juga disini belum maksimal. Memang dek kadang-kadang dilakukan penyuluhan tapi belum efektif dek” (Wawancara dengan Muhammad Natsir 29 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kondisi kelembagaan atau tingkat keterberdayaan kelompok tani yang ada di Kelurahan Sangiasseri, masih biasa-biasa saja mungkin semua itu disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari faktor kelompok tani itu sendiri, maupun faktor

pemerintah. Atinya itu semua disebabkan karena banyak anggota kelompok tani tidak aktif ini disebabkan karena kurangnya motivasi untuk hadir dalam penyuluhan karena kebanyakan masih percaya dengan tekniknya sendiri dalam bertani padi sehingga kelompok tani ini tidak ada perkembangan artinya masih jalan ditempat, maka disinilah dibutuhkan kerja keras pemerintah melakukan pemberdayaan kepada kelompok tani artinya bagaimana pemerintah melakukan pendampingan dalam penumbuhan kelompok tani, bagaimana pemerintah melakukan penguatan kelembagaan kelompok tani dan pengawalan kegiatan tau program dikelompok tani. Maka pemerintah harus serius melakukan pemberdayaan kepada kelompok tani sehingga terwujudnya kemandirian kelompok tani.

Berikut hasil wawancara dengan ketua kelompok tani, terkait dengan kondisi kelembagaan atau tingkat keterberdayaan kelompok tani yang ada di Kelurahan Sangiasseri :

“Alhamdulillah cukup bagus, saya menjadi ketua kelompok mulai 2016 sampai sekarang, alhamdulillah ada perkembangan, kondisi kelompok tani bagus, kita bantu membantu kelompok tani masyarakat mengelolah usaha taninya, dengan dibentuknya kelompok sangat membantu kita para petani, penghasilan ada peningkatan mungkin belum terlalu, dulu sering dilakukan pelatihan, pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, tapi tahun ini baru satu kali diadakan pelatihan” (Wawancara dengan Renggang 29 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kondisi kelembagaan atau tingkat keterberdayaan kelompok tani yang ada di Kelurahan Sangiasseri, sudah mulai bagus karena dengan adanya kolaborasi pemerintah daerah dalam hal ini dinas pertanian dengan kelompok tani yang selalu memberikan perhatian kepada petani sehingga petani mampu meningkatkan

hasil produksinya dari tahun ketahun, adanya perkembangan semua itu disebabkan oleh peran pemerintah sehingga ada perkembangan dalam artian bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah baik dalam pengadaan sarana dan prasarana seperti adanya pengadaan lahan sebagai percontohan yang dibiayai oleh pemerintah, memberikan bantuan bibit dan pupuk, maupun melakukan penyuluhan kepada kelompok tani sebelum musim tanam maupun di musim panen demi kesejahteraan petani.

Maka dibutuhkan konsistensi pemerintah dalam menjalankan programnya yang terkait dalam Program peningkatan kesejahteraan petani dan pengembangan pemberdayaan kelembagaan pertanian. Dan pemerintah dalam melakukan penyuluhan harus konsisten dan harus serius sehingga bisa terwujud kemandirian kelompok tani dan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani yang tergabung dalam kelompok tani yang ada di Kelurahan Sangiasseri. Berikut hasil wawancara dengan ketua kelompok tani, terkait dengan kondisi kelembagaan atau tingkat kemandirian kelompok tani yang ada di Kelurahan Sangiasseri :

“Kondisi kelompok tani ya bagus, soalnya baruka juga jadi ketua kelompok tani, baru lebih satu tahun lah kadang satu kali satu bulan pertemuan antara anggota kelompok, tapi tidak tentu kapan, tergantung anggota sebenarnya kalau rencana usaha kelompok ada, nammun sebenarnya kita mampu mengelolah usaha tani kita, tapi kendala kita pemasaran, itu kendala disini, karena infrastruktur tidak bagus jadi susah pemasarannya,” (Wawancara dengan Mappabiring 30 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kondisi kelembagaan atau tingkat kemandirian kelompok tani yang ada di Kelurahan Sangiasseri, sudah mulai bagus, ada perkembangan semua itu disebabkan oleh kolaborasi pemerintah sehingga ada perkembangan. Dari hasil wawancara

diatas menunjukan masih terdapat banyak kekurangan baik dan pihak pemerintah maupun dari pihak kelompok tani. Maka dibutuhkan keseriusan dari pemerintah dalam melakukan pemberdayaan kepada kelompok tani maupun keseriusan kelompok tani itu sendiri, dalam artian bagaimana pemerintah membantu kelompok tani dalam memasarkan hasil pertanian sehingga pemasaran hasil pertanian kelompok tani bisa berjalan efektif. Maka dibutuhkan kerja sama antara pihak pemerintah maupun pihak kelompok tani sehingga bisa terwujud kemandirian kelompok tani dapat meningkatkan kesejahteraan para petani yang tergabung dalam kelompok tani yang ada di Kelurahan Sangiasseri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Kelompok Tani di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan.

Kolaborasi pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani adalah melakukan penyuluhan atau pendampingan, memberikan bantuan baik berupa dana maupun pupuk dan pengadaan sarana dan prasarana sehingga dapat tercapai kemandirian kelompok tani. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan menjelaskan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal tapi ada upaya pemerintah untuk memperbaikinya, baik dari segi penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah belum efektif, bantuan dana, pupuk maupun obat-obatan untuk membasmi hama-hama dari pemerintah masih kurang dan pangadaan sarana dan prasarana masih kurang. Maka dibutuhkan konsistensi pemerintah maupun kelompok tani untuk mempertahankan semua itu sehingga kedepannya bisa tercapai kemandirian kelompok tani dikelurahan Sangiassri.

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Hasil Produksi Padi di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan.

Peranan Dinas Pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani di kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan dapat disimpulkan bahwa

Dinas Pertanian dalam melaksanakan pemberdayaan Kelompok Tani yang meliputi pelatihan dan penyuluhan itu sudah dilaksanakan oleh Balai Penyuluhan Pertanian Sinjai selatan dan Dinas Pertanian Kabupaten Sinjai, kemudian bantuan bibit dan pupuk itu juga sudah terlaksana tetapi belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih kurangnya stok bibit dan pupuk yang didapatkan petani serta adanya keluhan dari petani dikarenakan dalam pemberian bantuan itu digilir setiap tahunnya, dan bantuan teknologi pertanian sudah berjalan atau terlaksana tetapi lagi-lagi dapat dikatakan belum maksimal. itu disebabkan oleh masih kurangnya jumlah kuota bantuan yang didapatkan oleh kelompok tani dari Dinas Pertanian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka yang menjadi saran dari penulis yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian seharusnya lebih memaksimalkan jumlah kuota bantuan-bantuan diberikan kepada kelompok tani yang ada di kelurahan Sangiasseri agar para kelompok tani bisa lebih sejahtera dan terbantu dengan bantuan tersebut.
2. Pemerintah harus membantu kelompok tani baik dalam hal pengadaan sarana dan prasarana pertanian maupun bantuan dana dan lain-lain.
3. Pemerintah harus melakukan pemberdayaan kepada kelompok tani baik dalam hal penyuluhan harus maksimal sehingga bisa meningkatkan kemampuan dan keterampilan kelompok tani untuk mampu mandiri dan bisa meningkatkan kesejahteraannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2004. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : PT. Rebnika Cipta.
- Anonimous, 2004. *Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani*. Departemen RI Topik Latihan Di BPP. Departemen Pertanian.
- Ansell, C. dan Alison G. 2007. *Collaborative Governance In Theory And Practice. Journal Of Public Administration Research And Theory*. University of California: Berkeley.
- Deptan. 2007. *Peraturan Menteri Pertanian No.273/Kpts/Ot.160/4/2007 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani*. Jakarta: Deptan.
- Dwi Narwoko J. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Dwiyanto, Agus. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Everingham, Jo-Anne; Jeni Warburton; Michael Cuthill; Helen Bartlett. 2012. "Collaborative Governance of Ageing": Challenges for Local Government.
- Hadari Nawawi.2005. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agug.
- Kasturi, Besse. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Padi di Kabupaten Wajo*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Kusnandar. 2013. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, 2005. *Pengertian Kelompok*, Diakses melalui <http://site.google.com/site>. Pada tanggal 2 maret 2018.
- Nainggolan, K., Harahap, I. M., dan Erdiman. 2014. *Teknologi Melipat Gandakan Produksi Padi Nasional*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Polak, Mayor, 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas*. Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Rahim, Abd. 2012. *Model Analisis Ekonomi Pertanian*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Saptana, Saktyanu KD, Sri Wahyuni, Ening Ariningsih dan Valeriana Darwis. 2004. *Integritasi Kelembagaan Forum KASS dan Program Agropolitan*

dalam rangka pengembangan sayuran sumatera. Pusat Penelitian Sosial Ekonom. Bogor.

Sensus BPS dalam angka 2017. *Badan Pusat Statisti Kabupaten Sinjai*, <http://site.google.com/site> diakses pada 2 Maret 2018.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada.

Sudarmo. 2011. *Isu-isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance*. Surakarta: Smart Media.

Sugiyono.2012.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung :Alfabeta.

Suradisastra, K. 2008. *Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani*. Forum penelitian agro ekonomi. Bogor : Pusat analisis Sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Sutrisno, dkk. 2009. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Padi di Kecamatan Nogosari*. (Online), Volume 12, No.1, (<http://download.portalgaruda.org/article>)

Syafiie, 2002, *istilah ilmu pemerintahan* diakses melalui <http://site.google.com/site>. Pada tanggal 2 maret 2018.

Syahyuti. 2003. *Model Kelembagaan Penunjang Pengembangan Pertanian di Lahan Lebak*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.

Thompson, Perry and Miller. 2007. *Conceptualizing and Measuring Collaboration*. *Jurnal of Public Administration Research and Theory Advance Access published December 1, 2007 in Partnering with the Senior's Sectors*". *Local Government Sudies*.

Winardi. 2004. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Pranada Media

Zaidan Nawawi, 2013, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta : Rajawali Pers

Dokumen-dokumen

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Petani.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Maulana Nur, lahir di Sinjai pada tanggal 21 Juli 1996. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Muhammad Nur G dan Ibu Nurhayati. Penulis menyelesaikan pendidikan di bangku SD Negeri 42 Kecamatan Sinjai Selatan tamat pada tahun 2008, dan melanjutkan di SMP Negeri 1 Kecamatan Sinjai Selatan tamat pada tahun 2011, dan masuk SMA Negeri 2 Kecamatan Sinjai Selatan pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan selesai pada tahun 2019.